



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2022;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
20. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 63);
21. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIRKO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terwujudnya perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2019-2024;
- b. tercapainya pemanfaatan potensi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak secara maksimal, efisien dan efektif;
- c. menjadi kerangka acuan bagi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan perangkatnya dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD; dan
- d. sebagai instrumen penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

BAB III
RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK
Pasal 5

- (1) Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.
- (2) Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 memuat program, kegiatan dan pagu Indikatif.
- (3) Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022.
- (4) Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam menyusun RKA.

Pasal 6

- (1) Penjabaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN;

- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Juli 2021

WALIKOTA PONTIANAK,


EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 67

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK**



**RENCANA KERJA
2022**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan kerja merupakan proses sistematis penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2022 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Koperasi dan Usaha mikro, Perdagangan, Perindustrian di Kota Pontianak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. LATAR BELAKANG	I.1
1.2. LANDASAN HUKUM	I.2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I.6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I.7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II.1
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD	II.1
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	II.22
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD	II.47
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	II.50
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	II.62
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	III.1
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	III.2
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	III.4
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV.1
4.1. RENCANA KERJA	IV.1
4.2. PENDANAAN	IV.1
BAB V. PENUTUP	V.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai turunannya maka wajib disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tiap tahunnya.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Memperhatikan Visi Kota Pontianak yaitu **"PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT"**, serta melihat kondisi dan situasi sekarang ini di era globalisasi guna mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga terwujud sinergi dalam memformulasikan perencanaan pembangunan di Daerah. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan antara lain bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Renja ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

22. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 63); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022-2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RENSTRA OPD secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan OPD pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.

4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian, dan Perdagangan yang efektif dan efisien.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan TUPOKSI, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; tujuan dan sasaran target kinerja OPD 1(satu) tahun kedepan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaahan terhadap Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 1(satu) tahun kedepan.

Bab IV Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh OPD.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, usaha mikro, industri, perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan Kota Pontianak; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Tahun 2019 :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan pada Kegiatan Pembelian Peralatan Standar Kemetrollogian (Sumber dana DAK), kendala pelaksanaan kegiatan adalah Karena pada saat pelaksanaan lelang pertama tidak ada penawaran dan lelang kedua yang melewati batas akhir penginputan OMSPAN, sehingga penganggaran tidak dapat direalisasikan.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional pada Kegiatan Operasional UPTD Pasar tradisional, kendala pelaksanaan kegiatan adalah Karena belum beroperasionalnya IPAL di Pasar Flamboyan, sehingga penganggaran untuk belanja Bahan pengolah IPAL tidak direalisasikan.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional pada Kegiatan Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar, kendala pelaksanaan kegiatan adalah karena kuantitas aparatur yang ditugaskan pada UPTD Jasa Usaha Pasar sedikit, sehingga realiasi perjalanan dinas dalam daerah tidak direalisasikan secara maksimal.

Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional pada Kegiatan Renovasi Pasar Puring (Sumber dana DAK), kendala pelaksanaan kegiatan adalah karena ada sanggahan lelang yang melewati batas akhir penginputan OMSPAN.

Tahun 2018 :

1. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM pada Kegiatan Pengelolaan data/informasi KUMKM (updating data KUMKM), kendala pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya personil untuk melaksanakan Pengelolaan data/Informasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Program pengembangan IKM dan Industri kreatif pada Kegiatan Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM, kendala pelaksanaan kegiatan adalah test kit yang akan digunakan untuk pelaksanaan pengujian sudah kadaluarsa.
3. Program pengembangan IKM dan Industri kreatif pada Kegiatan Pelatihan dan Implementasi teknis desain packaging, kendala pelaksanaan kegiatan adalah Industri yang ditunjuk tidak bersedia untuk mengikuti pelatihan yang dimaksud.
4. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri pada Kegiatan Monitoring perkembangan harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan inflasi daerah, kendala pelaksanaan kegiatan adalah sarana prasarana (papan Visual) pada pasar rakyat yang menjadi target sudah optimal.
5. Program Pembinaan dan pengembangan pasar tradisional pada Kegiatan Operasional UPTD Pasar tradisional adalah belum operasionalnya IPAL pada pasar flamboyan sehingga belanja yang dianggarkan tidak terealisasi.

Tahun 2017 :

Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional pada kegiatan Pembangunan Ruko Ex. Bukit Timah, kendala pelaksanaan kegiatan karena telah terjadi gagal lelang.

Tahun 2016 :

1. Program pengembangan Industri Kimia Agro dan hasil hutan (IKAHH) kegiatan Penguatan jaringan klaster industri dengan target 1 kegiatan, anggaran tidak terserap maksiman karena minimnya data yang ada dan kurangnya feedback dari kelurahan.
2. Program Pengembangan Industri Logam Mesin elektronika dan aneka pada kegiatan Pengujian dan monev produk pangan IRT/IKM tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Kendala karena Test kit masih ada stok, tenaga teknis tidak ada, perlu penanganan khusus untuk penyimpanan test kit.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional pada kegiatan Operasional UPTD Pasar Tradisional, kendala pelaksanaan kegiatan karena IPAL di pasar flamboyan yang direncanakan beroperasi tahun 2016 tidak beroperasi sehingga penganggaran untuk belanja bahan pembersih dan listrik tidak dilaksanakan, kegiatan Pembangunan Pasar Belimbing Lanjutan (DAK), kendala pelaksanaan kegiatan ini adalah ketersediaan anggaran DAK berkurang, kegiatan Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar, kendala pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini dilaksanakan setelah pengesahan anggaran perubahan.
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada kegiatan Pengembangan pemasaran berbasis IT, kendala pelaksanaan kegiatan ini adalah sampai pada akhir tahun tidak ada UMKM yang mengajukan fasilitasi pemasaran secara online.
5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada kegiatan Penataan dan pengendalian PKL, kendala pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi kepada PKL tentang tarif dan kawasan khusus untuk PKL langsung dilaksanakan pada saat melakukan pendataan PKL dan PKL secara aktif yang mencari informasi dan memberikan informasi langsung ke Dinas yang menangani.

6. Program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dan kegiatan rutin lainnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi.

Tahun 2015 :

1. Program Pengembangan IKM & Industri kreatif pada kegiatan Pelatihan P-IRT dan Pengujian sampel, kendala pelaksanaan kegiatan ini adalah pada penyerapan anggaran yang diperuntukkan untuk pengadaan alat test kit tidak terealisasi karena tempat penyimpanan alat test kit tidak tersedia.
2. Program Pengembangan IKM & Industri kreatif pada kegiatan Perluasan penerapan HaKI dan sertifikasi halal industri, kendala pelaksanaan kegiatan ini adalah pada penyerapan anggaran karena sampai pada akhir tahun 2015 tidak ada pengajuan HaKI oleh pengusaha IMKM.

Sedangkan program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 : Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah pada kegiatan Pengembangan sarana/prasarana UKM di 6 Kecamatan, dengan target 50 UMKM atau 300 UMKM, namun pelaksanaan melebihi dari target yang ditetapkan. Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 output berupa bantuan etalase kepada pelaku UMKM yang bergerak di usaha kantin sekolah untuk mewujudkan kantin sehat.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengantisipasi permasalahan yang ada dan akan datang adalah memprioritaskan kegiatan yang lebih menyentuh kepada pelaku usaha UMKM dengan terus meningkatkan daya saing, seperti kegiatan pengembangan sarana/prasarana pada IMKM (Industri Mikro, Kecil

dan Menengah) dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak atau bantuan sosial kepada UMKM, pengembangan pemasaran yang berbasis teknologi. Rencana kerja yang telah dilaksanakan dan capaian RENSTRA dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1										
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan										
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021										
Kota Pontianak										
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2020			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TAHUN 2020										
2.11.2.11.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2.11.2.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Pelunasan tagihan jasa Komunikasi, SDA dan listrik	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.007	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan elektronika	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat kehadiran rapat, koordinasi dan konsultasi	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.015	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.011	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Jasa teknis administrasi perkantoran	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.022	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.01.023	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan	1	1	1	1	100%			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2020			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.2.11.01.00.02	Program Peningkatan Sarana prasarana dan perlengkapan kantor									
2.11.2.11.01.00.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan	1	12	1	1	100%			
2.11.2.11.01.00.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	12	12	12	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perl dan Barang Inventaris								
2.11.2.11.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris Kantor	Pemeliharaan Inventaris Kantor	12	12	12	12	100%			
2.11.2.11.01.00.02.027	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12		12	12				
2.11.2.11.01.00.02.057	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor	1	12	1	1	100%			
2.11.2.11.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
2.11.2.11.01.00.05.003	Pendidikan dan pelatihan formal	Keikutsertaan kursus/bimtek/sejenisnya	70	3	70	70	100%			
2.11.2.11.01.00.06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja									
2.11.2.11.01.00.06.001	Penyusunan Rencana Kerja	RENJA, RKA, RKA-P, RKT	8	4	8	8	100%			
2.11.2.11.01.00.06.004	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	LaKIP, LPPD, SPIP,data LKPJ	4	4	4	4	100%			
2.11.2.11.01.00.07	Program Peningkatan Disiplin dan kinerja Aparatur									
2.11.2.11.01.00.07.006	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas dan Batik	7	70	7	7	100%			
2.11.2.11.01.00.08	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan									
2.11.2.11.01.00.08.001	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	1	2	1	1	100%			
	Program Peningkatan Pelayanan Prima									
2.11.2.11.01.00.09.004	Penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100%			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2020			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.2.11.01.00.10	Program Pengembangan data/informasi									
2.11.2.11.01.00.10.001	Penyusunan data dan Profil OPD	Data dan Profil OPD	1	1	1	1	100%			
2.11.2.11.01.00.11	Program Pengembangan Sistem Informasi									
2.11.2.11.01.00.11.002	Pengelolaan Website SKPD	website OPD terupdate	1		1	1				
2.11.2.11.01.00.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah									
2.11.2.11.01.00.16.001	Pelatihan dan Motivasi kewirausahaan	Jumlah Pelaku Usaha pemula yang dilatih	200	220	200	200	100%			
2.11.2.11.01.00.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah									
2.11.2.11.01.00.17.002	Pengadaan sarana prasarana gedung UMKM	Tersedianya sarana prasarana gedung UMKM		12						
2.11.2.11.01.00.17.002	Pengembangan Pemasaran berbasis IT	sistem e-commerce	1		1	1				
2.11.2.11.01.00.17.003	Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Jumlah pelaku usaha yang partisipasi dalam pameran	15		15	15				
2.11.2.11.01.00.18	Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)									
2.11.2.11.01.00.18.004	Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM	Jumlah Usaha mikro yang memiliki sarana prasarana standar	280	335	280	280	100%			
2.11.2.11.01.00.18.006	Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan KUMKM	Jumlah Koperasi dan Usaha mikro yang difasilitasi Pembiayaan	100	93	100	100	100%			
2.11.2.11.01.00.19	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM									
2.11.2.11.01.00.19.001	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi Usaha Mikro Kecil yang dimonev	100	1	100	100	100%			
2.11.2.11.01.00.19.002	Motivasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Jumlah Koperasi yang dimotivasi	150	91	150	150	100%			
2.11.2.11.01.00.19.003	Sosialisasi dan Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah koperasi baru	15		15	15	100%			
2.11.2.11.01.00.19.005	Pelatihan dan Penilaian Pengelolaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai	50	87	50	50	100%			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2020			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.2.11.01.00.20	Program Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan									
2.11.2.11.01.00.20.001	Penataan dan Pengendalian PKL	Jumlah wilayah PKL yang dibina	1	1	1	1	100%			
2.11.2.11.01.00.21	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
3.06.2.11.01.00.21.001	Pembinaan/Validasi Pelaku Usaha Impor (API)	Jumlah calon/pelaku usaha yang dibina	25	99	25	25	100%			
2.11.2.11.01.00.22	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat									
3.06.2.11.01.00.22.003	Pengamanan dan Kebersihan Pasar	Jumlah Pasar rakyat yang aman dan bersih	17	9	17	17	100%			
3.06.2.11.01.00.22.005	Registrasi dan Pendataan Objek retribusi	Persentase Tempat usaha yang diregistrasi	1	100	1	1	100%			
3.06.2.11.01.00.22.007	Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar	Jumlah pasar yang dibina oleh UPTD	7	12	7	7	100%			
3.06.2.11.01.00.22.008	Operasional UPTD Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dibina oleh UPTD	14	12	14	14	100%			
3.06.2.11.01.00.22.009	Pembersihan Saluran Pasar Rakyat	Pembersihan saluran pasar	11	7	11	11	100%			
3.06.2.11.01.00.22.011	Renovasi Pasar	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat binaan	1	0	1	1	100%			
3.06.2.11.01.00.22.013	Pemeliharaan dan Pembinaan pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat binaan yang dipelihara	14		14	14	100%			
	Pengembangan Pasar Tradisional	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat binaan p		1						
2.11.2.11.01.00.23	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri									
3.06.2.11.01.00.23.001	Monitoring Distribusi SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya	jumlah laporan evaluasi ketersediaan sembako	12	12	12	12	100%			
3.06.2.11.01.00.23.002	Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya dan Inflasi Daerah	Terkendalnya harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya	12	12	12	12	100%			
3.06.2.11.01.00.23.003	Gelar Dagang Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	25		25	25	100%			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2020			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.2.11.01.00.24	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									
3.06.2.11.01.00.24.001	Fasilitasi Pasar Murah Menjelang Hari Raya	Jumlah Operasi pasar murah	2	1	2	2	100%			
3.06.2.11.01.00.24.002	Operasional UPT Kemetrolagian Daerah	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	2250	4472	2250	2250	100%			
3.06.2.11.01.00.24.003	Pengawasan Barang Beredar	Jumlah barang beredar yang diawasi	12	12	12	12	100%			
	Pembelian Kendaraan Kemetrolagian	Jumlah Kendaraan Kemetrolagian		3						
	Pembelian Peralatan Standar Kemetrolagian	Pemeliharaan Peralatan standar kemetrolagian daerah		12						
3.06.2.11.01.00.24.006	Peningkatan Sarana Prasarana UPT Metrologi Legal Kota Pontianak	Sarana prasarana UPT Metrologi Legal	1		1	1	100%			
3.06.2.11.01.00.24.007	Pengawasan Kemetrolagian Daerah	Jumlah alat UTTP yang diawasi	2500		2500	2500	100%			
3.06.2.11.01.00.24.008	Pemeliharaan dan Verifikasi Peralatan Standar Kemetrolagian Daerah	Jumlah peralatan standar yang diperihara dan verifikasi	100		100	100	100%			
2.11.2.11.01.00.25	Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif									
3.07.2.11.01.00.25.001	Pengujian dan Monev Produk Pangan	Jumlah Produk pangan yang diuji	20	1	20	20	100%			
3.07.2.11.01.00.25.004	Promosi dan Pameran Produk Industri kreatif	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosi	30		30	30	100%			
3.07.2.11.01.00.25.005	Pembinaan dan Pelatihan Industri	Jumlah industri yang dilatih	420	180	420	420	100%			
2.11.2.11.01.00.26	Program Pengembangan Industri Kimia agro dan Hasil Hutan (IKAHH)									
3.07.2.11.01.00.26.002	Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri	Jumlah industri yang di monitor dan di evaluasi	50	107	50	50	100%			
2.11.2.11.01.00.27	Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka									
3.07.2.11.01.00.27.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana dan prasarana industri untuk produk unggulan yang ditingkatkan	3		3	3	100%			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TAHUN 2021										
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35,29%					35,29%	35,29%	100%
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	47%					47%	47%	100%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	2 pasar					2 pasar	2 pasar	100%
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan	17 pasar					17 pasar	17 pasar	100%
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan	100%					100%	100%	100%
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar	23 pasar					23 pasar	23 pasar	100%
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan	23 pasar					23 pasar	23 pasar	100%
		Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%					100%	100%	100%
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%					100%	100%	100%
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%					100%	100%	100%
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah barang beredar yang diawasi	12 item					12 item	12 item	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92%					92%	92%	100%
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	100%					100%	100%	100%
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	< 5 %					< 5 %	< 5 %	100%
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi pasar	2 kali					2 kali	2 kali	100%
		Volume Ekspor (ton)	575906					575906	575906	100%
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	24%					24%	24%	100%
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 kali					1 kali	1 kali	100%
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang dibina	10 usaha					10 usaha	10 usaha	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100%					100%	100%	100%
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) bertanda tera sah yang berlaku	97%					97%	97%	100%
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%					100%	100%	100%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
		Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40%					40%	40%	100%
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100%					100%	100%	100%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	2 kali					2 kali	2 kali	100%
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,25%					16,25%	16,25%	100%
		persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	26%					26%	26%	100%
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%					100%	100%	100%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%					100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan	40 produk					40 produk	40 produk	100%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Industri yang diberdayakan	8 Industri					8 Industri	8 Industri	100%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Industri yang dilatih	25 industri					25 industri	25 industri	100%
		Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90%					90%	90%	100%
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	1. 2,5%					1. 2,5%	1. 2,5%	100%
		2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2. 65%					2. 65%	2. 65%	100%
		03. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3. 100%					3. 100%	3. 100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%					100%	100%	100%
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI)	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
		Persentase pertumbuhan industri	2,36%					2,36%	2,36%	100%
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	14%					14%	14%	100%
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
		Persentase Koperasi yang berkualitas	4,50%					4,50%	4,50%	100%
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%					100%	100%	100%
		persentase koperasi aktif	95,80%					95,80%	95,80%	100%
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,96%					0,96%	0,96%	100%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%					100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19%					19%	19%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19%					19%	19%	100%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	16,67%					16,67%	16,67%	100%
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	33%					33%	33%	100%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19%					19%	19%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31%					31%	31%	100%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	5. Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	200 unit					200 unit	200 unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10%					10%	10%	100%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5%					5%	5%	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	40 unit					40 unit	40 unit	100%
		Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4,30%					4,30%	4,30%	100%
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5%					5%	5%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3%					3%	3%	100%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro	50 usaha					50 usaha	50 usaha	100%
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3%					3%	3%	100%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3%					3%	3%	100%
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5. jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	40 Usaha					40 Usaha	40 Usaha	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90%					90%	90%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dok/lap					12 dok/lap	12 dok/lap	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	50 sub kegiatan					50 sub kegiatan	50 sub kegiatan	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	40 sub kegiatan					40 sub kegiatan	40 sub kegiatan	100%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 laporan					2 laporan	2 laporan	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan					2 laporan	2 laporan	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN					60 ASN	60 ASN	100%
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	120 stel					120 stel	120 stel	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit					12 unit	12 unit	100%
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit					10 unit	10 unit	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	30 unit					30 unit	30 unit	100%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 unit					1 unit	1 unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	6 Unit					6 Unit	6 Unit	100%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit					2 unit	2 unit	100%

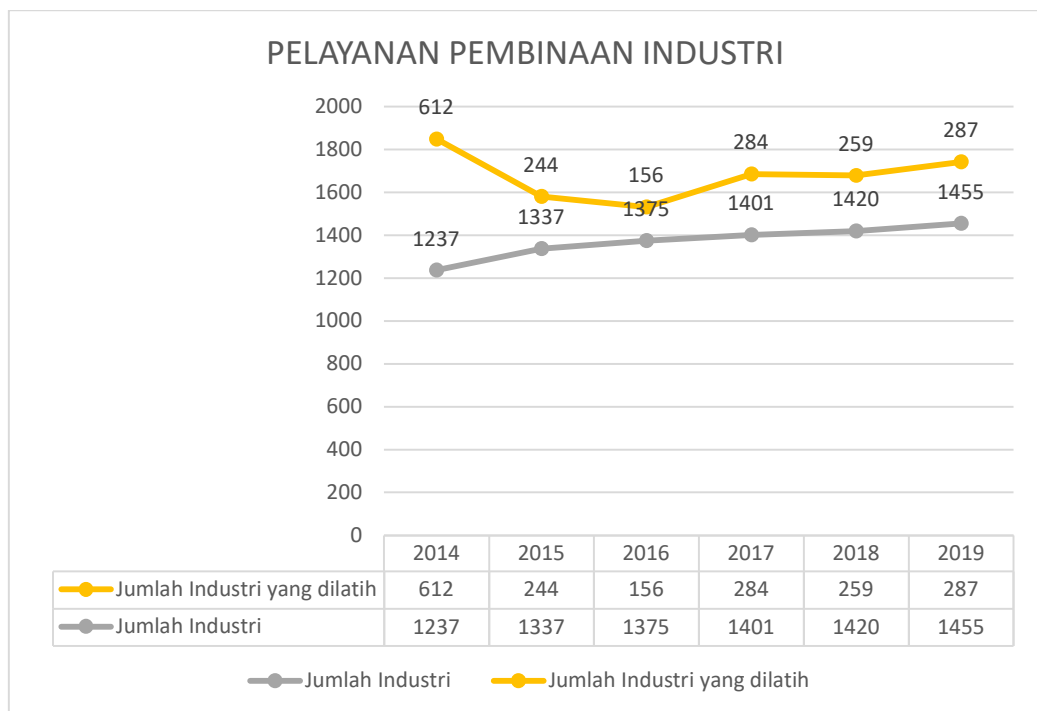
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.2.1 Pelayanan Industri

Pelayanan sektor Industri yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah atau Industri Rumah Tangga (IKM/IRT)

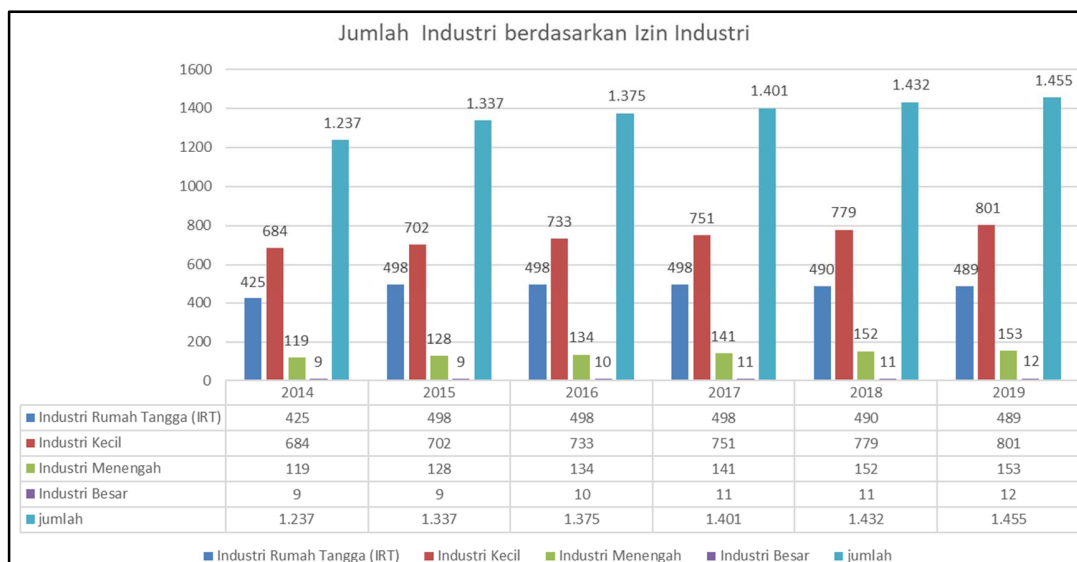
Pembinaan dan pelatihan IKM/IRT merupakan upaya pengembangan potensi unggulan daerah yang mampu meningkatkan kualitas kemampuan IKM/IRT dan nilai tambah serta menumbuhkembangkan IKM/IRT potensial dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun global. Kinerja pelayanan pembinaan dapat dilihat pada tabel berikut :



b. Penilaian Kelayakan Perizinan Industri

Izin industri sendiri di klasifikasikan berdasarkan investasinya menjadi TDI (investasi 5 sd 200 juta), IUI Menengah (200 juta sd 10 Milliar) dan IUI Besar (> 10 Milliar). Perizinan industri yang telah diterbitkan dari tahun 2010 sd 2013 adalah 298. Perizinan industri ini diperbaharui setiap 3 tahun sekali.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan pemeriksaan lapangan terdapat indikasi pencemaran industri, tidak dilakukannya upaya pencegahan pencemaran industri oleh pelaku usaha industri, tidak terlihat kegiatan produksi, mesin/peralatan yang digunakan membahayakan pekerja, tidak terdapat *sefety* untuk permesinan, tidak diketahui kejelasan tentang asal mula bahan baku yang digunakan, komoditi yang dihasilkan membahayakan masyarakat atau ilegal, pekerjaan dilakukan melewati batas kapasitas mesin/peralatan, dan kegiatan produksi industri yang dilakukan mengganggu masyarakat sekitar setelah penerbitan perizinan terdapat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Kinerja pemeriksaan kelayakan perizinan Industri dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.2

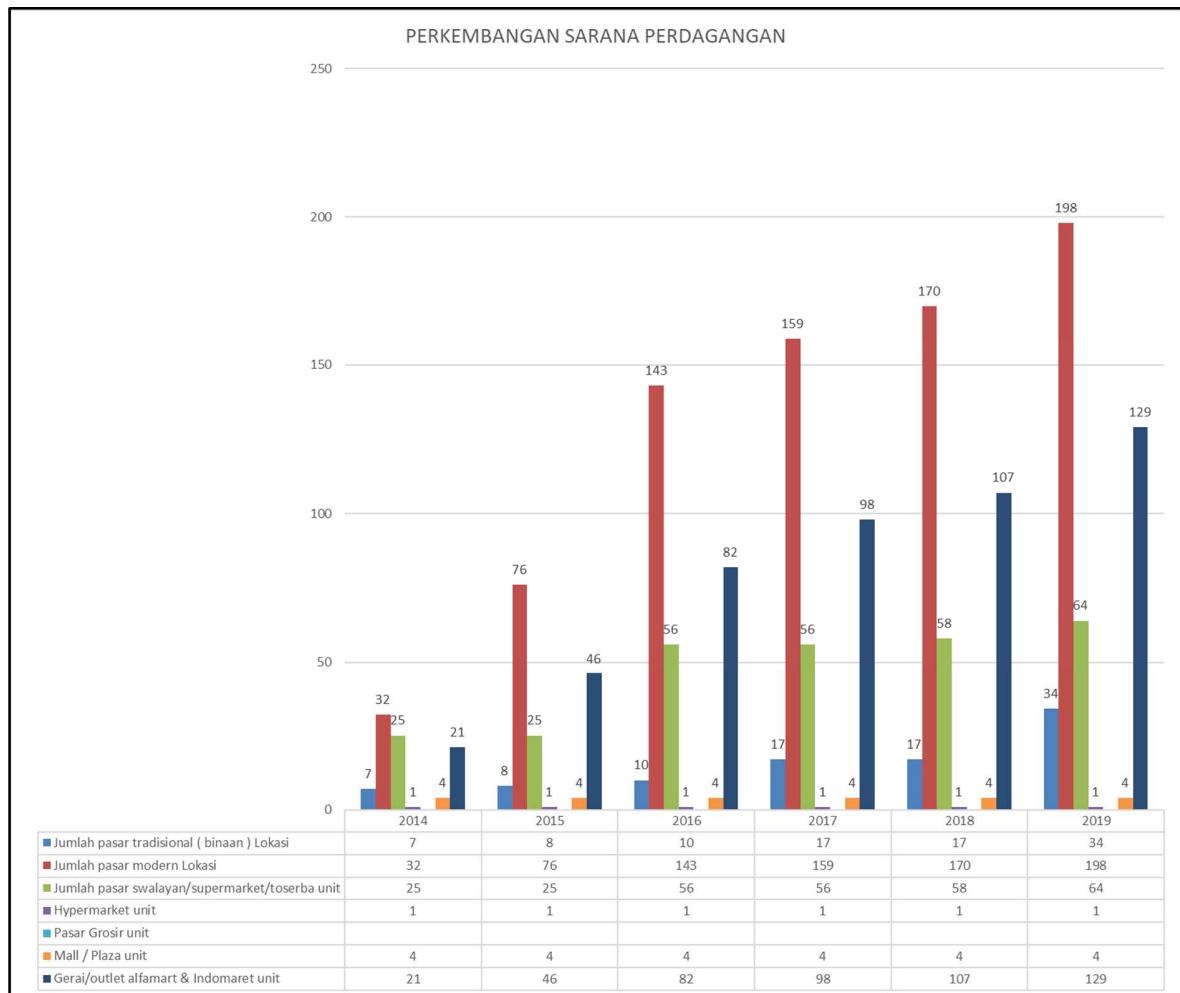
REKAP INDUSTRI 2014 S/D TAHUN 2019								
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	JUMLAH INDUSTRI	unit	1237	1337	1375	1401	1432	1455
	1) Industri Besar (Investasi > 10 Milyard)							
	- Unit Kerja	unit	9	9	10	11	11	12
	- Tenaga Kerja	unit	1403	1403	1418	1428	1428	1587
	- Nilai Investasi	Rp. Juta	12.527.818	12.527.818	17.534.898	17.538.398	17.538.398	24.932.898
	KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018		9	9	10	11	11	12
	1. Pengolahan Pangan	unit	4	4	4	4	4	5
	2. Tekstil	unit	-	-	-	-	-	-
	3. kulit	unit	-	-	-	-	-	-
	4. kayu	unit	-	-	-	-	-	-
	5. kertas	unit	-	-	-	1	1	1
	6. kimia farmasi	unit	-	-	-	-	-	-
	7. pengolahan karet	unit	4	4	4	4	4	4
	8. galian bukan logam	unit	-	-	-	-	-	-
	9. baja/pengolahan logam	unit	-	-	-	-	-	-
	10. peralatan	unit	1	1	1	1	1	1
	11. pertambangan	unit	-	-	1	1	1	1
	12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-	-
	2) Industri Menengah (Investasi 200 jt s/d 10 Milyard)							
	- Unit Kerja	unit	119	128	134	141	152	153
	- Tenaga Kerja	unit	2201	2529	2792	2836	2967	2983
	- Nilai Investasi	Rp. Juta	130.913	142.395	144.620	157.620	171.480	178.233
	KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018	unit	119	128	134	141	152	153
	1. Pengolahan Pangan	unit	27	31	32	34	37	36
	2. Tekstil	unit	8	9	9	9	9	9
	3. kulit	unit	-	-	-	-	-	-
	4. kayu	unit	11	12	12	12	12	12
	5. kertas	unit	31	33	34	36	39	41
	6. kimia farmasi	unit	7	7	7	7	7	7
	7. pengolahan karet	unit	-	-	-	-	-	-
	8. galian bukan logam	unit	-	-	-	1	1	1
	9. baja/pengolahan logam	unit	7	8	10	10	12	11
	10. peralatan	unit	28	28	30	32	35	36
	11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-	-
	12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-	-
	3) Industri Kecil (Investasi 5 juta s/d 200 Juta)							
	- Unit Kerja	unit	684	702	733	751	779	801
	- Tenaga Kerja	unit	2841	2976	3391	3391	3598	3691
	- Nilai Investasi	Rp. Juta	47.102	48.477	49.358	51.435	52.825	58.130
	KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018	unit	684	702	733	751	779	801
	1. Pengolahan Pangan	unit	209	216	226	236	246	256
	2. Tekstil	unit	75	82	86	87	88	88
	3. kulit	unit	-	-	-	-	-	-
	4. kayu	unit	48	39	40	41	42	43
	5. kertas	unit	142	145	148	151	155	163
	6. kimia farmasi	unit	13	14	15	15	16	16
	7. pengolahan karet	unit	-	-	-	1	1	1
	8. galian bukan logam	unit	6	6	6	6	6	6
	9. baja/pengolahan logam	unit	36	37	38	39	41	43
	10. peralatan	unit	155	163	174	175	184	185
	11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-	-
	12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-	-
	4) Industri Rumah Tangga							
	- Unit Kerja	unit	425	498	498	498	490	489
	- Tenaga Kerja	unit	989	1239	1239	1239	1239	1237
	- Nilai Investasi	Rp. Juta	186,50	407,36	407,36	407,36	407,36	407,36
	KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018	unit	425	498	498	498	490	489
	1. Pengolahan Pangan	unit	413	464	464	464	460	459
	2. Tekstil	unit	-	2	2	2	2	2
	3. kulit	unit	-	-	-	-	-	-
	4. kayu	unit	3	4	4	4	4	4
	5. kertas	unit	-	12	12	12	12	12
	6. kimia farmasi	unit	-	-	-	-	-	-
	7. pengolahan karet	unit	-	-	-	-	-	-
	8. galian bukan logam	unit	-	-	-	-	-	-
	9. baja/pengolahan logam	unit	1	1	1	1	1	1
	10. peralatan	unit	8	15	15	15	11	11
	11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-	-
	12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-	-

2.2.2 Pelayanan Perdagangan

Pelayanan perdagangan yang ditangani meliputi :

- a. Pemberian Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan berkas yang diajukan oleh BP2T, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas, jika sesuai, maka di terbitkanlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TDG.
- b. Pemberian Rekomendasi Perdagangan Kayu antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan berkas yang diajukan oleh BP2T, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas, jika sesuai, maka di terbitkanlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PKAPT.
- c. Pemberian Rekomendasi Perdagangan Pupuk Antar Pulau Terdaftar (PPAPT) dengan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan berkas yang diajukan oleh BP2T, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas, jika sesuai, maka di terbitkanlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPAPT.
- d. Pengawasan Barang Beredar, dilakukan sebanyak 11 Jenis produk setiap tahunnya dengan objek pengawasan berbeda. Pengawasan barang beredar ini sebagai bentuk pembinaan baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Untuk pelaku usaha diharapkan agar menjual produk-produk yang sudah ber SNI (untuk barang-barang tertentu) dan untuk masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas didalam memilih produk yang akan dipergunakan.
- e. Pembuatan Rekomendasi Berita Acara Angka Pengenal Importir (BA-API) dengan mengadakan penelitian lokasi tempat usaha dan penyusunan berita acara pemeriksaan.
- f. Pelayanan Perlindungan konsumen dan pengamanan dalam negeri berupa pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Pontianak.

Gambaran perkembangan sektor perdagangan yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada table-tabel berikut.



Tabel 2.3

DAFTAR NAMA PASAR MODERN DI KOTA PONTIANAK S/D TAHUN 2019										
NO	NAMA PASAR	ALAMAT	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)	STATUS TANAH	JUMLAH PKL YANG DITAMPUNG	JUMLAH T. KERJA (ORANG)	TAHUN DIBANGUN	KEL	KECAMATAN PONTIANAK
1	HYPERMART	Jl. A. Yani Komp. A.Yani Mega Mall	-	-	-	-	-	2008	PARIT TOKAYA	selatan
2	CARREFOUR	Jl. Jend Urip Komp Matahari Mall	9.820	1.900	SEWA	-	82	2011	DA RAT SEKIP	Kota
3	MATAHARI MALL	Jl. Jend. Urip	9.820	22.000	HGB	75	551	1999	DA RAT SEKIP	Kota
4	RAMAYANA DEPT STORE	Jl. Tanjungpura	10.000	7.000	-	-	-	-	BENUA MELAYU LUT	selatan
5	MINI MARKET TANJUNG	Jl. Tekam Perumnas II						-	TANJUNG HULU	Timur
6	MINI MARKET ABADI JAYA	Jl. M. Sohor No.12-12						-	PARIT TOKAYA	selatan
7	MINI MARKET ACI	Jl. Gusti Hamzah						-	SUNGAJAWI	Kota
8	MINI MARKET AHENG	Jl. Purnama No.1 A						-	PARIT TOKAYA	selatan
9	MINI MARKET AISYAH TOSERBA	Jl. Podomoro						-	SUNGAJAWI	Kota
10	MINI MARKET ARDYTA	Jl. Ujung Pandang						-	SUNGAJAWI	Kota
11	MINI MARKET ARYO & DIFO	Jl. P. Natakusuma						-	SUNGAJAWI	Kota
12	MINI MARKET ASOKA	Jl. KHW Hasyim						-	TENGAH	Kota
13	MINI MARKET CEMPAKA MAS	Jl. Danau sentarum						-	SUNGAJAWI	Kota
14	MINI MARKET CHAN-Q	Jl. Purnama 2						-	PARIT TOKAYA	selatan
15	MINI MARKET CITRA PANGERAN	Jl. Parit Pangeran						2000	SIANTAN HULU	Utara
16	MINI MARKET HAPPY I	Jl. HRA Rahman						2010	SUNGAJAWI	Kota
17	MINI MARKET HAPPY II	Jl. Gusti Hamzah						2010	SUNGAJAWI	Kota
18	MINI MARKET HAPPY MART I	Jl. Husin Hamzah						-	SUNGAJAWI DALAM	Barat
19	MINI MARKET INDO MARET PURNAMA	Jl. Purnama						-	PARIT TOKAYA	selatan
20	MINI MARKET KITA	Jl. P.H. Husin II						-	BANCA BELITUNG DA RAT	Tenggara
21	MINI MARKET LANGGANAN KITA	Jl. Alianyang						-	SUNGAJAWI	Kota
22	MINI MARKET LUCKY	Jl. M. Sohor No.3						-	PARIT TOKAYA	selatan
23	MINI MARKET MADANI MART	Jl. Wonobaru						-	PARIT TOKAYA	selatan
24	MINI MARKET MAJU	Jl. P.H. Husin II						-	BANCA BELITUNG DA RAT	Tenggara
25	MINI MARKET MAL MART	Jl. Husin Hamzah						-	SUNGAJAWI DALAM	Barat
26	MINI MARKET MAMA MARKET	Jl. Purnama No.45						-	PARIT TOKAYA	selatan
27	MINI MARKET MEGA MART	Jl. Husin Hamzah						-	SUNGAJAWI DALAM	Barat
28	MINI MARKET MINI SUPER	Jl. Tabrani ahmad						-	SUNGAJAWI	Kota
29	MINI MARKET MITRA JAYA 88	Jl. Ya'M Sabran						-	TANJUNG HULU	Timur
30	MINI MARKET PADI	Jl. Prof Dr. Hamka						-	SUNGAJAWI	Kota
31	MINI MARKET PAL MART	Jl. Husin Hamzah						-	SUNGAJAWI DALAM	Barat
32	MINI MARKET PARIS 2	Jl. P.H. Husin II						-	BANCA BELITUNG DA RAT	Tenggara
33	MINI MARKET PRIMA JAYA	Jl. Purnama No.168 F						-	PARIT TOKAYA	selatan
34	MINI MARKET PRIMADONA	Jl. Tabrani ahmad						-	SUNGAJAWI	Kota
35	MINI MARKET PURNAMA MART	Jl. Purnama						-	PARIT TOKAYA	selatan
36	MINI MARKET RAICA	Jl. Ujung Pandang						-	SUNGAJAWI	Kota
37	MINI MARKET RIZIQ	Jl. Husin Hamzah						-	SUNGAJAWI DALAM	Barat
38	MINI MARKET SAFANI	Jl. Danau sentarum						-	SUNGAJAWI BANGKONG	Kota
39	MINI MARKET SARI HARUM	Jl. Purnama						-	PARIT TOKAYA	selatan
40	MINI MARKET SEPAKAT KOTA	Jl. Dr. Wahidin S						-	SUNGAJAWI	Kota
41	MINI MARKET SHOPPING	Jl. H.R.A Rahman & Jl. Husin Hamzah						-	SUNGAJAWI DALAM	Barat
42	MINI MARKET SIM JAYA ABADI	Jl. Panglima A'im						-	TANJUNG HULU	Timur
43	MINI MARKET TALENT SHOP	Jl. Purnama No.7						-	PARIT TOKAYA	selatan
44	MINI MARKET YUNI MART	Jl. Purnama						-	PARIT TOKAYA	selatan
45	SWALAYAN CITRA JERUJU	Jl. Kom Yos Sudarso No.33	-	-	-	-	-	-	SUNGAJAWI LUAR	Barat
46	SWALAYAN CITRA NIAGA	Jl. Gajahmada Komp.Ps. Flamboyen						-	BENUA MELAYU DA RAT	selatan
47	SWALAYAN CITRA SIANTAN	Jl. Gst Mahmud No.8	1.350	1.105	H.MILIK	Tidak ada	82	2002	SIANTAN HILIR	Utara
48	SWALAYAN CITRA UTAMA	Jl. Imam Bonjol						-	BANCA LUT	selatan
49	SWALAYAN FAMILY MART	Jl. P.H. Husin II						-	BANCA BELITUNG DA RAT	Tenggara
50	SWALAYAN GARUDA MITRA	Jl. HRA Rahman	2.576	1.872	H.MILIK	Tidak ada	215	1991	SUNGAJAWI DALAM	Barat
51	SWALAYAN HARUM MANIS	Jl. Agus salim	712	1.622	HGB	Tidak ada	58	1984	BENUA MELAYU DA RAT	selatan
52	SWALAYAN KAISAR	Jl. Pattimura	-	-	-	-	-	-	DA RAT SEKIP	Kota
53	SWALAYAN KAISAR SIANTAN	Jl. Gst Mahmud	-	-	-	-	-	-	SIANTAN HILIR	Utara
54	SWALAYAN LIGO MITRA	Jl. Gajahmada	1400	3357	H.MILIK	Tidak ada	127	-	BENUA MELAYU DA RAT	selatan
55	SWALAYAN MITRA ANDA	Jl. Hasanudin	2.077	3.795	H.MILIK	Tidak ada	147	1992	SUNGAJAWI LUAR	Barat
56	SWALAYAN MITRA MART I	Jl. HRA. Rahman	1.903	2.979	H.MILIK	Tidak ada	127	2002	SUNGAJAWI DALAM	Barat
57	SWALAYAN MITRA MART II	Jl. St. Abdurrahman	-	-	H.MILIK	Tidak ada	20	-	AKCAYA	Kota
58	SWALAYAN MITRA MART III	Jl. Sei Raya Dalam						2013	BANCA BELITUNG DA RAT	Tenggara
59	SWALAYAN MITRA MART IV	Jl. Dr. Wahidin S						-	SUNGAJAWI	Kota
60	SWALAYAN PURNAMA	Jl. Purnama						-	PARIT TOKAYA	selatan
61	SWALAYAN XING MART	Jl. Sei Raya Dalam						-	BANCA BELITUNG DA RAT	Tenggara
62	FRESHMART PANGILMA AIM	Jl. Panglima A'im						2016	DALAM BUGIS	Timur
63	FRESHMART KH DAHLAN	Jl. K.H.A. Dahlan No. 59						2016	DA RAT SEKIP	Kota
64	MINI MARKET CEMPAKA BARU	Jl. Prof M. Yamin						2019	kota baru	selatan
65	SRC DEL MART PONTIANAK	Jl. ALianyang No.26 a						2019	SUNGAJAWI BANGKONG	Kota
66	RAFA MART	Jl. Selat Panjang Komp. Landak Griya Permai Ruko A-1						2019	SIANTAN HULU	Utara
67	MINI MARKET UNASEL ABADI	Jl. Selayar No. 24						2019	AKCAYA	selatan
68	PRIME MART	Jl. Prof. M. Yamin No. 28-A						2019	kota baru	selatan

Tabel 2.4

DATA GERAJ/OUTLET TOKO MODERN (INDOMARET)
KONDISI SAMPAI DENGAN OKTOBER 2019

NO	ALAMAT LENGKAP				Tahun Berdiri
1	IDM. HUSEIN HAMZAH	JL. HUSEIN HAMZAH RT.001/RW.004	PAL LIMA	BARAT	2014
2	IDF. TABRANI AHMAD	JL. TABRANI AHMAD	SUNGAI JAWI	BARAT	2015
3	IDF. R.E. MARTADINATA	JL. RE.MARTADINATA	SUNGAI JAWI LUAR	BARAT	2015
4	IDM. KOM YOS SUDARSO	JL. KOM YOS SUDARSO, RT.06/RW.25	SUNGAI BELIUNG	BARAT	2016
5	IDM. KARET	JL. KARET, Rt.003/Rw.035	SUNGAI BELIUNG	BARAT	2017
6	IDM. DR. WAHIDIN	JL. DR WAHIDIN RAYA NO.45 RT.004/RW.020	SUNGAI JAWI	KOTA	2014
7	IDM. ALIANYANG 97	JL. ALIANYANG NO.97	SUNGAI BANGKONG	KOTA	2014
8	IDM. DANAU SENTARUM	JL. DANAU SENTARUM RT.004/RW.028	SUNGAI BANGKONG	KOTA	2014
9	IDM. NATAKUSUMA	JL. PANGERAN NATAKUSUMA RT.003/RW.005	SUNGAI BANGKONG	KOTA	2014
10	IDM. URAY BAWADI	JL. URAY BAWADI NO.6 RT.004/06	SUNGAI BANGKONG	KOTA	2014
11	IDM. DR. SUTOMO	JL. DR. SUTOMO NO.44, RT.3/RW.01	SUNGAI BANGKONG	KOTA	2014
12	IDM. GUSTI HAMZAH	JL. GUSTI HAMZAH, RT.005/RW.008	SUNGAI JAWI	KOTA	2015
13	IDM. PUTRI CANDRAMIDI	JL. PUTRI CANDRAMIDI NO.B1 DAN B2 RT.08/RW.08	SUNGAI BANGKONG	KOTA	2015
14	IDM. K.H. AHMAD DAHLAN	JL. K.H. AHMAD DAHLAN RT.02/RW.15	SUNGAI BANGKONG	KOTA	2015
15	IDM. AMPERA	JL. AMPERA RT.06/RW.030	SUNGAI BANGKONG	KOTA	2015
16	IDM. WAHID HASYIM	JL. KHW. HASYIM RT.001/RW.001	SUNGAI JAWI	KOTA	2015
17	IDM. JOHAR 10	JL. JOHAR NO.10 RT.03/RW.10	DARAT SEKIP	KOTA	2015
18	IDF. SUWIGNYO	JL. HM.SUWIGNYO, RT.003/RW.011	SUNGAI JAWI	KOTA	2015
19	IDF. JEND. URIP	JL. JEND.URIP NO.35 RT.005/RW.002	TENGAH	KOTA	2015
20	IDM. DR. WAHIDIN 9B	JL. DR. WAHIDIN S, RT.001/RW.031	SUNGAI JAWI	KOTA	2016
21	IDF. TEUKU UMAR	JL. TEUKU UMAR No. 60 B	DARAT SEKIP	KOTA	2016
22	IDM. TANJUNG PURA	JL. IMAM BONJOL NO.451 RT.001/RW.018	BENUA MELAYU DARAT	SELATAN	2014
23	IDM. PURNAMA	JL. PURNAMA Gg. SURYA PURNAMA NO.58 RT.003/RW.010	AKCAYA	SELATAN	2014
24	IDM. M. YAMIN	JL. PROF. M. YAMIN No. 3	KOTA BARU	SELATAN	2014
25	IDM. GAJAH MADA 183	JL. GAJAH MADA NO.183-185	BENUA MELAYU DARAT	SELATAN	2014
26	IDM. SULTAN ABDURRAHMAN	JL. SULTAN ABDURRAHMAN	AKCAYA	SELATAN	2014
27	IDM. KARYA BARU	JL. KARYA BARU RT.003/RW.01	PARIT TOKAYA	SELATAN	2015
28	IDM. M. YAMIN NO.16	JL. PROF. M. YAMIN NO.16 A-B, RT.001/RW.001	KOTA BARU	SELATAN	2015
29	IDM. HYBRID GAJAH MADA 70	JL. GAJAH MADA 70, RT.001/RW.029	BENUA MELAYU DARAT	SELATAN	2015
30	IDM. A. YANI MEGA MALL	JL. A.YANI KOMP.SENTRA BISNIS NO.AA02,RT.001/RW.010	PARIT TOKAYA	SELATAN	2015
31	IDM. HIJAS	JL. HIJAS, RT.05 RW.13	BENUA MELAYU DARAT	SELATAN	2015
32	IDM. PURNAMA 56	JL. PURNAMA 1 NO.56, RT.03/RW.015	AKCAYA	SELATAN	2015
33	IDM. PAHLAWAN 23	JL. PAHLAWAN NO.3-2, RT.002/RW.020	BENUA MELAYU DARAT	SELATAN	2016
34	IDM. RAYA TANJUNG PURA	JL. TANJUNG PURA, RT.03/RW.03	BENUA MELAYU LAUT	SELATAN	2016
35	IDM. WR SUPRATMAN	JL. WR. SUPRATMAN	BENUA MELAYU DARAT	SELATAN	2017
36	IDM.M.SOHOR	JL. M. SOHOR	PARIT TOKAYA	SELATAN	2017
37	IDM. IMAM BONJOL	JL. IMAM BONJOL NO.451 RT.001/RW.018	BENUA MELAYU LAUT	SELATAN	2017

NO	ALAMAT LENGKAP				Tahun Berdiri
38	IDM. AYANI 7,8,9	JL. JENDRAL AHMAD YANI RT.001/RW.001	BANSIR DARAT	TENGGARA	2014
39	IDM. ADISUCIPTO 53	JL. ADISUCIPTO No.53 Rt.003/Rw.009	BANGKA BELITUNG LAUT	TENGGARA	2014
40	IDM. SEPAKAT II	JL. A.YANI Gg. SEPAKAT II NO.154	BANSIR DARAT	TENGGARA	2014
41	IDM. PARIT HAJI HUSIN II No.3	JL. PARIT HAJI HUSIN II NO.3 RT.01/RW.03	BANGKA BELITUNG DARAT	TENGGARA	2015
42	IDF. PARIT HAJI HUSIN II	JL. PARIT HAJI HUSEIN II KOMP. PESONA MUTIARA DEWATA	BANSIR DARAT	TENGGARA	2015
43	IDM. PARIT HAJI HUSIN	JL. PARIT HAJI HUSIN II	BANGKA BELITUNG DARAT	TENGGARA	2017
44	IDM. SUNGAI RAYA	JL. SUNGAI RAYA DALAM II	BANGKA BELITUNG DARAT	TENGGARA	2018
45	IDM. PARIT HAJI HUSIN I	JL. PARIT HAJI HUSIN I	BANGKA BELITUNG LAUT	TENGGARA	2018
46	IDM. PANGLIMA AIM	JL. PANGLIMA AIM NO.09 RT.004/RW.005	TANJUNG HULU	TIMUR	2014
47	IDM. TANJUNG RAYA II	JL. TANJUNG RAYA II RT.006/RW.003	SAIGON	TIMUR	2014
48	IDM. YAM SABRAN	JL. YA'M SABRAN NO.6-8 RT.006/RW.002	TANJUNG HULU	TIMUR	2014
49	IDM. TANJUNG RAYA II 375	JL. TANJUNG RAYA II 375 RT.004/RW.17	SAIGON	TIMUR	2015
50	IDM. TANJUNG RAYA II 1A	JL. TANJUNG RAYA II NO.1A, RT.002/RW.014	DALAM BUGIS	TIMUR	2015
51	IDM. 28 OKTOBER	JL. 28 OKTOBER	SIANTAN HULU	UTARA	2014
52	IDM. SIANTAN HILIR	JL. KHATULISTIWA RT.004/RW.14	SIANTAN HILIR	UTARA	2014
53	IDF. GUSTI SITUT MAHMUD	JL. GUSTI SITUT MAHMUD RT.003/RW.011	SIANTAN HULU	UTARA	2014
54	IDM. BUDI UTOMO	JL. BUDI UTOMO, RT.01/RW.28	SIANTAN HULU	UTARA	2016
55	IDM. GUSTI SITUT MAHMUD	JL. GUSTI SITUT MAHMUD RT.04/RW.12	SIANTAN HULU	UTARA	2016
56	IDM. KHATULISTIWA	JL. KHATULISTIWA, RT.03/RW.08	SIANTAN HILIR	UTARA	2017
57	IDM. BATULAYANG	JL. KHATULISTIWA RT.003/RW.08	BATU LAYANG	UTARA	2017
58	IDM. SELAT PANJANG	JL. SELAT PANJANG	SIANTAN HULU	UTARA	2017
59	IDM. 28 OKTOBER	JL. 28 OKTOBER RT.04/ RW.032	SIANTAN HULU	UTARA	2019
60	IDM. PADAT KARYA	Jl. Padat karya	BANSIR DARAT	TENGGARA	2019
61	IDM. A YANI	JL. JENDRAL AHMAD YANI	BENUA MELAYU DARAT	SELATAN	2019
62	IDM. PERDANA	Jl. Perdana	bansir Laut	TENGGARA	2019
63	IDM. REFORMASI	Jl. Reformasi	BANSIR DARAT	TENGGARA	2019
64	IDM. HASANUDIN	Jl. HASANUDIN RT.006 RW.001	SUNGAI JAWI DALAM	KOTA	2019
65	IDM. HRA RAHMAN	Jl. H. RAIS A. RAHMAN RT.002 RW.016	SUNGAI JAWI DALAM	KOTA	2019
66	IDM. KHATULISTIWA	Jl. KHATULISTIWA RT.001 RW.017	BATU LAYANG	UTARA	2019
67	IDM.PURNAMA	Jl. PURNAMA II Rt.002 Rw.003	KOTA BARU	SELATAN	2019

Tabel 2.5

DATA TOKO MODERN ALFAMART TAHUN 2019				
NO	NAMA PEMOHON	NAMA/MERK USAHA	ALAMAT USAHA	KECAMATAN
1	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. 28 Oktober Rt.001/ Rw.022	Utara
2	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Tanjung Raya II Rt.02/Rw.03	Timur
3	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Perdana Komp.Perdana Square Blok E No.25	Selatan
4	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. RE. Martadinata Rt.003/Rw.010	Barat
5	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Pattimura No.98 Rt.02/ Rw.05	Kota
6	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Imam Bonjol Rt.003/Rw.010	Selatan
7	HENGKY SUBEKTI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Tritura Rt.01/Rw.01	Timur
8	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Gajahmada No.269,271,273 Rt.03/Rw.27	Selatan
9	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Merdeka Rt.03/Rw.03	Kota
10	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Kom Yos Sudarso Rt.01/Rw.02	Barat
11	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Teuku Umar Komp.Pontianak Mall Blok D No.09-10	Kota
12	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Prof. M. Yamin Rt.02/Rw.06	Selatan
13	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Putri Candramidi Rt.06/Rw.08	Kota
14	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Budi Karya Rt.04/ Rw.023	Selatan
15	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. KH. Wahid Hasyim Rt.01/Rw.21	Kota
16	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Danau Sentarum Rt.04/Rw.34	Kota
17	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Tabrani Ahmad Rt.004/Rw.027	Barat
18	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Dr. Wahidin.S Rt.001/Rw.035	Kota
19	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. P.H. Husin II Rt.03/Rw.02	Tenggara
20	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. HOS. Cokroaminoto No.2 Rt.003/Rw.008	Kota
21	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Dr. Sutomo Rt.03/Rw.17	Kota
22	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Ampera Rt.04 Rw.29	Kota
23	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Sultan Hamid 2	Utara
24	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Gusti situt mahmud Rt.02 Rw.12 samping Gg.swasembada 1	Utara
25	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Sultan Abdurrahman Rt.03/Rw.14	Kota
26	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Tanjung Pura Rt.03/Rw.16	Selatan
27	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Gusti Hamzah Rt.002/ Rw.012	Kota
28	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Purnama	Selatan
29	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. DR. Setia Budi No.26 Rt.005/Rw.008	Selatan
30	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Putri Dara Hitam Rt.02/Rw.11	Kota
31	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Imam Bonjol (Cipta Lancar) Rt.003/Rw.001	Tenggara
32	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Imam Bonjol	Tenggara
33	SURIADI	ALFAMART (PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Tanjung Pura Rt.04 Rw.05	Selatan
34	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk)	Jl. Bukit Barisan	Kota
35	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Parit. H. Husein II	Tenggara
36	SURIADI	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (ALFAMART)	Jl. H.M. Suwignyo RT.005/RW.10	Kota
37	SURIADI	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (ALFAMART)	Jl. Ya' M. Sabran RT.003/RW.14	Timur
38	SURIADI	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (ALFAMART)	Jl. Prof. M Yamin RT.003/RW. 13	Selatan
39	SURIADI	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (ALFAMART)	Jl. Husein Hamzah RT.005/RW.24	Barat
40	SURIADI	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (ALFAMART)	Jl. Tani Makmur No. 8B - BC RT. 003/RW. 14	Selatan
41	SURIADI	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (ALFAMART)	Jl. Khatulistiwa RT. 001/RW.23	Utara
42	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Ahmad Yani I Kav 1-2-3	Tenggara
43	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Tanjung Raya II RT. 02 / RW.019	Timur
44	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Selat Panjang	Utara
45	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Danau Sentarum	Kota
46	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Budi Utomo	Utara
47	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Purnama	Selatan
48	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Ya M. Sabran	Timur
49	SURIADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Parit H. Husin I	Tenggara
50	SOLIHIN	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jalan H Rais A Rahman RT 004 RW 018 (H. RAIS A. RAHMAN)	Barat
51	HARRYANTO SUSANTO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Karet, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak,	Barat
52	FENY DJOKO SUSANTO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Panglima Aim	Timur
53	ANGGARA HANS PRAWIRA	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jalan Tanjung Raya 2 Provinsi Kalimantan Barat,	Timur
54	SOENG PETER SURYADI	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jalan Apel Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak,	Barat
55	ANGGARA HANS PRAWIRA	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Parit Pangeran Rt. 003 Rw.010	Utara
56	ANDY PRASEIJONO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.008	Selatan
57	ANDY PRASEIJONO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Kom Yos Sudarso Rt.006 Rw.025	Barat
58	ANDY PRASEIJONO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Panglima Aim Rt.004 Rw.016	Timur
59	ANDY PRASEIJONO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Sultan Syarif Abdurrahman	Kota
60	ANDY PRASEIJONO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Tabrani Ahmad Komp. Harvin Indah Rt.003 Rw.022	Barat
61	ANDY PRASEIJONO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Urai bawadi	Kota
62	ANDY PRASEIJONO	ALFAMART (PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk)	Jl. Padat Karya Rt.004 Rw.006	Tenggara

2.2.3 Pelayanan Pasar

Pelayanan bidang pasar, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan pedagang dengan melakukan monitoring di pasar tradisional, berupa pendekatan secara persuasif kepada pedagang yang melanggar peraturan. Untuk pedagang yang tidak mengindahkan peringatan lisan, akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada Satuan Pamong Praja untuk dilakukan penindakan;
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana berupa monitoring kebersihan di pasar tradisional. Tindak lanjut hasil monitoring ini, selanjutnya dikoordinasikan dengan petugas kebersihan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk masalah kebersihan yang berada di sekitar pasar.
- c. Secara rutin, setiap bulan dilakukan pembersihan terhadap saluran air yang berada di seluruh pasar tradisional yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.
- d. Melakukan pendataan kembali terhadap jumlah pedagang dan PKL yang berada di kawasan pasar tradisional yang akan ditata.
- e. Melakukan penarikan retribusi sewa kios dan los di pasar tradisional.
- f. Melakukan penagihan terhadap pedagang yang menunggak biaya retribusi dan pemanfaatan

Gambaran perkembangan pasar tradisional yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.6
Data Pasar Rakyat s/d Tahun 2020
Di Kota Pontianak

NO	PASAR	KELURAHAN	KECAMATAN	BINAAN
1	pasar sepakat	PAL LIMA	Pontianak Barat	
2	pasar UKA	SUNGAI BELIUNG	Pontianak Barat	
3	pasar sore	SUNGAI BELIUNG	Pontianak Barat	
4	pasar nipah kuning	SUNGAI BELIUNG	Pontianak Barat	
5	Pasar Dahlia	SUNGAI JAWI DALAM	Pontianak Barat	D-KUMP
6	Pasar pagi Ibu	SUNGAI JAWI DALAM	Pontianak Barat	
7	Pasar teratai	SUNGAI JAWI LUAR	Pontianak Barat	D-KUMP
8	pasar belimbing	SUNGAI JAWI LUAR	Pontianak Barat	D-KUMP
9	pasar mawar	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	PT MUTIARA MAS PUTIH
10	pasar cempaka	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
11	Pasar Kapuas Indah	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
12	pasar pagi mariana	MARIANA	Pontianak Kota	
13	Pasar Pattimura	MARIANA	Pontianak Kota	D-KUMP
14	Pasar Jalan AR Hakim	MARIANA	Pontianak Kota	D-KUMP
15	Pasar Jalan Sisingamangaraja	MARIANA	Pontianak Kota	D-KUMP
16	pasar kemuning	SUNGAI BANGKONG	Pontianak Kota	D-KUMP
17	pasar pagi wahidin	SUNGAI BANGKONG	Pontianak Kota	
18	pasar rakyat (pancasila 5)	SUNGAI BANGKONG	Pontianak Kota	
19	pasar rakyat (H.Udin)	SUNGAI JAWI	Pontianak Kota	
20	Pasar rakyat Tengah /Parit Pekong	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
21	Pasar rakyat Tengah /Jl. Cimandiri/Bukit Timah	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
22	Pasar rakyat Tengah /Jl. Batang Hari Barat	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
23	Pasar rakyat Tengah /Jl. Batang Hari Timur	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
24	Pasar rakyat Tengah /Jl. Ciliwung	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
25	Pasar rakyat Tengah /Jl. Cimandiri	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
26	Pasar rakyat Tengah /Jl. Cisadane	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
27	Pasar rakyat Tengah /Jl. Citarum	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
28	Pasar rakyat Tengah /Jl. I. Gusti Ngurah Rai	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
29	Pasar rakyat Tengah /Jl. Serayu	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
30	Pasar rakyat Tengah /Jl. Indragiri Barat	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	D-KUMP
31	Pasar rakyat Tengah /Jl. Indragiri Timur	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
32	Pasar rakyat Tengah /Jl. Citandui	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
33	Pasar rakyat Tengah /Jl. Ciujung	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
34	Pasar rakyat Tengah/ pasar MAMBO Tanjung Pura	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
35	Pasar rakyat Tengah /Jl. Dunia Baru	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
36	Pasar rakyat Tengah /Jl. Pasar Beras	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
37	Pasar rakyat Tengah /Jl. Pawan	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	D-KUMP
38	pasar flamboyan	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	D-KUMP
39	pasar diponegoro	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
40	pasar kampung bali	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
41	pasar antasari	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
42	pasar setiabudi	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
43	pasar hijas	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
44	pasar siam	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
45	pasar seroja	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
46	pasar kamboja	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	
47	Pasar Harapan Jaya	Kota Baru	Pontianak Selatan	D-KUMP

NO	PASAR	KELURAHAN	KECAMATAN	BINAAN
48	pasar rakyat (purnama)	PARIT TOKAYA	Pontianak Selatan	
49	pasar ampera	PARIT TOKAYA	Pontianak Selatan	
50	pasar rakyat (H Thaha)	BANGKA BELITUNG DARAT	Pontianak Tenggara	
51	pasar rakyat (H Abd Saleh)	BANGKA BELITUNG DARAT	Pontianak Tenggara	
52	pasar kenanga keraton	DALAM BUGIS	Pontianak Timur	D-KUMP
53	pasar kenanga anggrek	TANJUNG HULU	Pontianak Timur	D-KUMP
54	pasar seruni	SAIGON	Pontianak Timur	
55	pasar batu layang	BATU LAYANG	Pontianak Utara	
56	pasar gst mahmud	SIANTAN HILIR	Pontianak Utara	
57	pasar jagung bakar	SIANTAN HULU	Pontianak Utara	
58	Pasar wan salim	SIANTAN HULU	Pontianak Utara	D-KUMP
59	Pasar Terminal Agribisnis	SIANTAN HULU	Pontianak Utara	D-KUMP
60	Pasar puring	SIANTAN TENGAH	Pontianak Utara	D-KUMP
61	pasar parit nenas	SIANTAN TENGAH	Pontianak Utara	
62	Pasar Alianyang	SUI JAWI	Pontianak Kota	
63	Pasar Bukit Timah	DARAT SEKIP	Pontianak Kota	
64	Pasar Dunia Baru	BENUA MELAYU DARAT	Pontianak Selatan	
65	Pasar ex-Terminal Siantan	SIANTAN TENGAH	Pontianak Utara	
66	Pasar rakyat Tengah / Pasar Jalan Pawan	BENUA MELAYU LAUT	Pontianak Selatan	
67	Pasar Swadaya	BANGKA BELITUNG LAUT	Pontianak Tenggara	

Tabel 2.7
Tarif Biaya Pendapatan Ruko, Kios dan Los
Bangunan Pasar Tradisional

NO	TEMPAT USAHA	TARIF	KETERANGAN
	PASAR FLAMBOYAN	Keputusan Walikota Pontianak Nomor 436/D-PPK-UKM/ Tahun 2013 tentang Penetapan biaya pemanfaatan bangunan Kios dan Los Pasar Flamboyan dan biaya kontribusi bangunan tempa penampungan sementara pasar flamboyan	
1	Kios Blok A 1 s/d 6	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
2	Kios Blok A 1	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
3	Kios Blok B 1 s/d 28	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
4	Kios Blok B 1 dan 28	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
5	Kios Blok C 1 s/d 33	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
6	Kios Blok C 1 dan 33	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
7	Kios Blok C 25	Rp / per pintu	Ukuran 4 x 6 M, kompensasi pembongkaran warung Uk 4x6 dibantaran sei parit bkaya
8	Kios	Rp 31,250,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, Utk Pedagang pindahan dari pemilik kios Uk 3 x 4 M dan memiliki SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
9	Kios Blok D 1 s/d 30	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, biaya kontribusi TPS Rp.7.500.000,- per pintu.
10	Kios Blok D 1 dan 16	Rp 110,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
11	Kios Blok D 15 dan 30	Rp 100,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
12	Kios Blok E 1 s/d 76	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
13	Kios Blok E 1 s/d 76	Rp 125,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
14	Kios Blok E 1,19,58, 76	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
15	Kios Blok E 1,19,58, 76	Rp 170,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
16	Kios Blok E 9,10,20,28,29,38,39,47,48,57,66 dan 67	Rp 75,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
17	Kios Blok E 9,10,20,28,29,38,39,47,48,57,66 dan 67	Rp 150,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
18	Kios Blok F 1 s/d 29	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
19	Kios Blok F 1 s/d 29	Rp 125,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
20	Kios Blok F 3,18,19, 30	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
21	Kios Blok F 3,18,19, 30	Rp 170,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
22	Kios Blok F 1,4,6,7	Rp 75,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
23	Kios Blok F 1,4,6,7	Rp 150,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
24	Los A 1 s/d 120	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
25	Los A 1 s/d 120	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
26	Los B 1 s/d 480	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
27	Los B 1 s/d 480	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
28	Los C 1 s/d 352	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
29	Los C 1 s/d 352	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
30	Los D 1 s/d 244	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
31	Los D 1 s/d 244	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
32	Los E 1 s/d 40	Rp 7,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 2 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.500.000,-
33	Los E 1 s/d 40	Rp 15,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 2 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.3.000.000,-

NO	TEMPAT USAHA	TARIF	KETERANGAN
	PASAR BELIMBING	Keputusan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sewa pemanfaatan meja dagangan di pasar belimbing	
1	Meja dagangan di dalam pasar belimbing untuk melakukan aktifitas sebesar Rp. 1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per meja per tahun sebanyak 72 los		
	PASAR JALAN INDRAGIRI TIMUR	TARIF SEWA	
1	KIOS Blok A,B dan C 70 Unit	Rp 1.800.000 / per Tahun	UKURAN 2X2 METER
2	KIOS Blok B 18 unit	Rp 1.170.000 / per Tahun	UKURAN 2X1,3 METER
	PASAR JALAN INDRAGIRI BARAT	TARIF SEWA	
1	KIOS Blok A,B dan C 41 Unit	Rp 1.800.000 / per Tahun	UKURAN 2X2 METER
2	KIOS Blok A,B dan C 51 unit	Rp 1.170.000 / per Tahun	UKURAN 2X1,3 METER
	PASAR JALAN PATTIMURA	TARIF SEWA	
1	KIOS 66 unit	Rp 6.000.000 / per Tahun	UKURAN 2 X 7,2 METER
2	KIOS 2 unit	Rp 3.600.000 / per Tahun	UKURAN 1,3 X 7,2 METER
	PASAR JALAN AR. HAKIM	TARIF SEWA	
1	KIOS sebanyak 48 Unit	Rp 2.520.000 / per Tahun	UKURAN 2 X 7,2 METER
	PASAR KAPUAS INDAH	TARIF SEWA	
1	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X2 METER	Rp 2.100.000 / per Tahun	52 unit
2	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X2 METER	Rp 1.560.000 / per Tahun	141 unit
3	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X4 METER	Rp 3.864.000 / per Tahun	1 unit
4	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X4 METER	Rp 4.116.000 / per Tahun	17 unit
5	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 3X5 METER	Rp 7.140.000 / per Tahun	9 unit
6	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 5X5 METER	Rp 11.460.000 / per Tahun	1 unit
7	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2X2 METER	Rp 1.200.000 / per Tahun	199 unit
8	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2X4 METER	Rp 2.964.000 / per Tahun	12 unit
9	KIOS LANTAI SATU UKURAN 4X5 METER	Rp 6.420.000 / per Tahun	8 unit
	PASAR RAKYAT TENGAH	TARIF SEWA	
1	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2,4 X 2,65 METER	Rp 3.000.000 / per Tahun	460 unit
2	KIOS LANTAI DUA UKURAN 2,4 X 2,65 METER	Rp 2.000.000 / per Tahun	327 unit
3	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 2.000.000 / per Tahun	64 unit (jalan serayu)
	PASAR KENANGA KERATON	TARIF SEWA	
1	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 440.000 / per Tahun	192 unit
	PASAR KENANGA ANGGREK	TARIF SEWA	
1	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 1.200.000 / per Tahun	100 unit
2	KIOS UKURAN 2 X 3 METER	Rp 2.160.000 / per Tahun	70 unit
Jika terjadi pengalihan atas bangunan Kios/Los kepada pihak lain biaya pemanfaatan tersebut tidak dikembalikan dan bagi pihak baru yang akan menempati Kios/Los tersebut di berlakukan biaya pemanfaatan bangunan non subsidi			

TABEL 2.8 TABEL TARIF RETRIBUSI PASAR BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN USAHA YANG BERDAGANG/BERUSAHA

NO	URAIAN	TARIF		
a.	KIOS	Rp	3,000	/hari
b.	LOS	Rp	2,000	/hari
c.	TENDA	Rp	2,000	/hari
d.	BAKULAN/HAMPARAN	Rp	2,000	/hari
e.	TOKO BERLANTAI III	Rp	350,000	/bulan
f.	TOKO BERLANTAI II	Rp	200,000	/bulan
g.	TOKO BERLANTAI I	Rp	200,000	/bulan
	KERAMAIAAN PASAR			
	• Pedagang kuliner yang menyediakan tempat makan	Rp	10,000	/Pdg/Hari
	• Pedagang yang berjualan minuman dan makanan kecil (kafe) yang menyediakan tempat makan	Rp	10,000	/Pdg/Hari
	• Pedagang buah	Rp	2,500	/Pdg/Hari
	• Pedagang gerobak dan/atau tidak menyediakan tempat makan	Rp	5,000	/Pdg/Hari
	• Pedagang yang berdagang di fasilitas umum yang ditetapkan Pemda	Rp	5,000	/Pdg/Hari
	• Orang pribadi/badan yang promosi produk di halaman parkir pasar Tradisional	Rp	50,000	/ M ²
I	Penunjukkan baru Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU)			
	KIOS	Rp	250,000	/Tahun
	LOS	Rp	150,000	/Tahun
	TENDA	Rp	100,000	/Tahun
II	Pendaftaran Ulang/ Her- registrasi Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU)			
	KIOS	Rp	100,000	/Tahun
	LOS	Rp	75,000	/Tahun
	TENDA	Rp	50,000	/Tahun
III	Balik Nama/Pemindahan Hak Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU)			
	KIOS	Rp	250,000	/Tahun
	LOS	Rp	150,000	/Tahun
	TENDA	Rp	100,000	/Tahun

Tabel 2.9

Perkembangan Pasar Tradisional yang Dibina di Kota Pontianak

NO	PASAR	STATUS/THN BERDIRI/THN REHAB	ALAMAT	VOLUME/ SATUAN	STATUS TANAH		JLH RUKO/KIOS/LOS/PKL														JML PDG SAAT	KONDISI PASAR	JLH DANA PEMBANGUNAN	KET
					LEGALITAS/GS/SU	TGL/NOMOR SERTIFIKAT	JENIS	TH 2009	TH 2010	TH 2011	TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019						
1	KEMUNING	Tanah Negara/T. Berdiri 1986/T. Rehab 2011	Jl. Prof M. Yamin, Kec. Pontianak Kota	LT:3141 M ² LB : 246 M ²	Pakai/ Gs.2055/1989 / Tgl. 12-07-1989	14 MEI 1991/110	KIOS				33	33	33	33	33	33	33	33	4	BAIK (2 Tkt)	3,5 M APBD	30,8 M x 17,6 M KIOS belum terjual 29 unit		
							LOS	90	90	90	159	159	159	159	159	159	159	159	159					
							JML	90	90	90	192	192	192	192	192	192	192	192	163					
2	CEMPAKA	tanah milik PEMDA/T. Berdiri 1978/ T. Rehab 1999	Jl. Kapten Marsan, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota	LB :2650 M ² LP : 4000 / 3177 M ²			KIOS LT1	47	228	228	228	227	227		47	47	47	47	47	BAIK (2 Tkt) 69 TUTUP	APBD			
							KIOS Lt2							181	181	181	181	181						
							LOS	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48					
							JML	93	276	276	276	275	275	275	276	276	276	276	276					
3	DAHLIA	Tanah Negara/Thn Berdiri 1980/Thn	Jl. HRA Rachman,Gg. Kinibalu Kec Ptk Barat	7324 M ² 1311 M ²	Pakai ;GS. 3329/1989;Tgl 29-09/1989	12 MEI 1991;59 ; 56	KIOS	508	508	508	508	508	508	508	508	516	508	508	506	BAIK (2 Tkt)	APBD			
							LOS	346	346	346	346	346	346	346	346	366	346	346	346					
							ETALASE	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
							JML	858	858	858	858	858	858	858	858	882	858	858	856					
4	TERATAI	Thn Berdiri 1982; Thn Rehab 1997, 2010	Jl. Kom Yos Sudarso, Kec. Pontianak Barat	LB: 2941 M ²	MILIK PEMDA; LT : 5767 M2		KIOS	106	106	106	204	204	204	204	205	205	205	205	120	BAIK (2 Tkt)	16.068 M (Thp I 7,9 M,Thp II 4,5 M,Thp III 3,5 M) APBD + APBN	KIOS BELUM TERJUAL 83 UNIT BERADA DI LT 2 dan 1 kios utk UPT		
							LOS	100	100	100	198	198	198	198	198	198	198	198	198					
							ETALASE																	
							PKL	117	117	117														
							JML	323	323	323	402	402	402	402	403	403	403	403	318					
5	PURING	Thn Berdiri 1983;Thn Rehab 2009	Jl. Khatulistiwa, Kec. Pontianak Utara	21.450 M ²	STAMPLAT OTO		RUKO		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	24	BAIK	15 M APBN	RUKO BELUM TERJUAL 4 UNIT		
							KIOS	56	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89					
							LOS	196	368	368	368	368	368	368	388	368	388	388	387					
							PKL	297	9	9	9	9	9	9	9	11	9	9	0					
							JML	549	498	498	498	498	498	498	518	500	518	518	500					
6	KENANGA KERATON	Pelepasan dengan ganti rugi Thn Berdiri 1992 Rehab Tahun 2016	Jl. Tanjungraya I Kec. Pontianak Timur kelurahan Dalam Bugis	3.750 M ²			KIOS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		0	BAIK	DAK			
							LOS	100	100	100	100	100	100	100	192	192	192		192					
							PKL	35	40	40	40	40	125	125										
							JML	153	158	158	158	158	243	243	210	210	210	0	192					
7	FLAMBOYAN	Thn Berdiri 1989; Thn Rehab 2012; Thn Rehab 2013	Jl. Gajah Mada	17.133 M ²			RUKO									53				Baik	APBD	LOS BLM TERJUAL 2 UNIT; KIOS BLM TERJUAL 2 UNIT di blok C dan 2 meja 2 SPTU jadi LOS 1240 SPTU		
							KIOS	63	63	63	63	203	203	203	203	203	203	203	203					
							LOS	1447	1447	1447	1447	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1240						
							LOS IKAN								277	277	277	277	277					
							PKL	285	301	208	208	208	208	208	0	0	0	0						
							JML	1795	1811	1718	1718	1647	1647	1647	1716	1769	1716	1716	1720					
8	Jl. Sisingamangar		Jl. Sisingamangaraja				TOKO Lt1	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	BAIK		bulanan		
							JML	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27					
9	PARIT WAN SALIM						KIOS LT2									4	4	4	4	BAIK		bulanan, 29 buah hgb/hpl		
							KIOS LT3	34	34	34	34	34	9	9	5	5	5	27	27					
							JML	34	34	34	34	34	9	9	9	9	9	31	31					
10	PASAR BELIMBING	TH. BANGUN 2015	Jalan Kom Yos Sudarso	LT=3657,5 M ² LB=2240 M ²			LOS								72	72	72	72	72	BAIK	DANA DAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN	sewa per tahun		
							JML	0	0	0	0	0	0	0	72	72	72	72	72					
11	PASAR PATTIMURA		Jl. PATTIMURA				KIOS								68	68	68	68	68	BAIK		per tahun		
							JML	0	0	0	0	0	0	0	68	68	68	68	68					
12	PASAR JL. AR HAKIM		Jl. AR HAKIM				KIOS								48	48	48	48	48	BAIK		per tahun		
							JML	0	0	0	0	0	0	0	48	48	48	48	48					
13	PASAR KAPUAS INDAH		Jl. KAPTEN MARSAN				KIOS Lt1								263	263	263	263	207	BAIK		per tahun		
							KIOS Lt2								241	241	241	241	252					
							JML	0	0	0	0	0	0	0	504	504	504	504	459					
14	PASAR						KIOS								70	70	70	70	0	BAIK				

NO	PASAR	STATUS/THN BERDIRI/THN REHAB	ALAMAT	VOLUME/ SATUAN	STATUS TANAH		JLH RUKO/KIOS/LOS/PKL														JML PDG SAAT	KONDISI PASAR	JLH DANA PEMBANGUNAN	KET
					LEGALITAS/GS/SU	TGL/NOMOR SERTIFIKAT	JENIS	TH 2009	TH 2010	TH 2011	TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019						
	KENANGA ANGGREK		Jalan Yam Sabran				LOS									100	100	100	100	18	KIOS 99		Tahunan	
							JML	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	170	170	18	UNIT TUTUP			
15	PASAR RAKYAT TENGAH	sejak jaman VOC/Tahun rehab 2016	Jl. Cimandiri (bukit timah)				kios 2 lt										4	64	64	4	BAIK		tahunan	
			Jl. Dunia Baru				TOKO lt3	49	49	49	49	43	43	43	46	49	49	49	49					
			Jl. Parit Pekong				KIOS lt1,2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	9	9	9					
			PASAR MAMBO, Jl Tanjungpura				KIOS Lt.3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8					
			Jl. Batang Hari barat				KIOS	72	72	72	72	72	72	72	72	33	72	72	72					
			Jl. Batang Hari timur				KIOS	72	72	72	72	72	72	72	72	33	72	72	36					
			Jl. Pasar Beras				KIOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	4					
			Jl. Pawan				LOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
			JL INDRAGIRI TIMUR				KIOS									88	88	88	40					
			JL INDRAGIRI BARAT				KIOS									92	92	92	32					
			Jl. Ciliwung	1512,0 M ²			KIOS LT1	123	123	123	123	123	123	123	72	72	72	72	72					
							KIOS LT2								51	51	51	51	51					
			Jl. Cimandiri	1544,4 M ²			KIOS LT1	3	3	3	3	3	4	4	76	76	76	76	76					
							KIOS LT2								54	54	54	54	54					
			Jl. Cisadane	1401,8 M ²			KIOS LT1	128	128	128	128	128	128	128	76	76	76	76	76					
							KIOS LT2								54	54	54	54	54					
			Jl. Citarum	1257,7 M ²			KIOS LT1	116	116	116	116	116	116	116	68	68	68	68	68					
							KIOS LT2								48	48	48	48	48					
Jl. Citandui	1685,1 M ²			KIOS LT1	144	144	144	144	144	144	144	84	84	84	84	84								
				KIOS LT2								60	60	60	60	60								
Jl. Ciujung	1650,7 M ²			KIOS LT1	144	144	144	144	144	144	144	84	84	84	84	84								
				KIOS LT2								60	60	60	60	60								
Jl. I Gusti Ngurah Rai				LOS								35	35	35	35	35								
Jl. Serayu	935,6 M ²			LOS	28	28	28	28	28	28	28	64	64	64	64	64								
							JML	921	921	921	921	915	916	916	1298	1227	1359	1359	1146					
							KIOS									4	12	12		BAIK		tahunan		
							LOS									32	32	32						
							JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	44	0	BAIK		tahunan	
							KIOS									7	7	7						
							LOS									140	140	140						
							JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147	147	0				
JUMLAH								4843	4996	4903	5084	5006	5067	5067	6369	6540	6621	6433	5894					

2.2.4 Pelayanan bidang Koperasi dan UKM

Pelayanan bidang Koperasi dan UKM, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pelayanan penyuluhan pembentukan koperasi.
- b. Pelayanan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pontianak diberikan kepada Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam seluruh Indonesia. Bagi Koperasi diluar wilayah Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kota Pontianak harus mengajukan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas beserta administrasi lainnya dan akan dilanjutkan kepada Bapak Walikota Pontianak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI untuk mendapatkan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di Kota Pontianak dan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Begitu juga sebaliknya Koperasi Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah lainnya seluruh Indonesia harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang menangani urusan Koperasi dimana Koperasi tersebut membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dan baru dapat beroperasi setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas dari Walikota Pontianak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
- c. Pendataan dan Identifikasi Potensi UKM dilakukan agar para pelaku usaha kecil dan menengah daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing yang ada, maka pelaku-pelaku UKM harus siap menghadang usahanya dengan berbagai strategi, salah satunya adalah meningkatkan

peran pembinaan Pemerintah Daerah melalui Lembaga yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui Pemutakhiran data UKM Kota Pontianak, mempertahankan pangsa pasar yang telah ada sebagai strategi jangka pendek, meningkatkan kualitas dan mutu produk-produk UKM menjadi lebih unggul dari pada produk-produk luar daerah, menembus pasar-pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar sebagai strategi program jangka menengah dan jangka panjang, menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing tinggi, serta mengembangkan usaha yang baru tanpa mematikan usaha yang telah ada. Pendataan dan Identifikasi Potensi juga untuk mengetahui jumlah UKM dan potensi yang ada pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dapat dikembangkan sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dimana, dalam UU dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria asset maksimal 50 Juta dan Omset maksimal 300 juta; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset lebih dari 50 s/d 500 juta dengan omset lebih dari 300 juta s/d 2,5 M; sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dengan asset lebih dari 500 juta s/d 1M dan omzet lebih dari 2,5 s/d 50 M. Dengan dilakukannya pendataan secara

rutin dan berkala diharapkan program pembinaan, pengembangan tepat sasaran.

- d. Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan Usaha Kecil Menengah di Kota Pontianak dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap tahunnya. Pembinaan dan Pengembangan yang dilakukan berupa program Peningkatan Pengembangan Usaha Koperasi, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, Program Pelatihan Kewirausahaan bagi Siswa SMK dan SMA se-Kota Pontianak dan adanya Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil yang Kondusif. Program – program Pembinaan dan Pengembangan ini pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari bidang pendidikan, bidang pendanaan, dan Dinas Pariwisata. Program-program Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan UKM yang ditangani Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pontianak meliputi Kegiatan Pameran dan Gelar Produk Koperasi dan UKM, Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK dan SMA, Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM dan Calon Wirausaha, dan adanya kegiatan Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di setiap Kecamatan. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan program ini bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan UKM sebagai ujung tombak pembangunan dimana pelaku UKM dapat bersaing dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dan dapat menembus pasar baru daripada produk yang serupa dari luar daerah, sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Pontianak. Potensi masalah yang banyak dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah adalah dalam hal : bidang

permodalan, bidang pemasaran, bahan baku, tenaga kerja dan manajemen. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan ukm sesuai dengan Potensi Masalah sehingga UKM diharapkan mampu dan menjadi penyokong utama ekonomi di Kota Pontianak ini. Potensi masalah pada bidang akses pendanaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan Pelatihan Kewirausahaan bekerjasama dengan pihak Perbankan. Pada bidang Pemasaran, kegiatan yang mendukung dengan mengikuti pameran-pameran baik di Provinsi Kalimantan Barat dan di luar Provinsi Kalimantan Barat. Pada bidang Manajemen, Dinas Kumdag melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bekerjasama dengan Universitas Negeri di Kota Pontianak.

Gambaran pelayanan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Tabel Kinerja sektor koperasi dan Usaha Mikro di Kota Pontianak
Tahun 2013-2019

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koperasi per jenis	Koperasi	797	799	809	814	816	818	522
	Koperasi Industri Kerajinan (KOPINKRA)	Unit	1	1	2	3	3	3	3
	Koperasi Konsumsi /Koperasi Serba Usaha (KSU)	Unit	456	451	452	452	452	453	248
	Koperasi Pegawai Telkom (Koppegstel)	Unit	1	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Jasa	Unit	4	7	13	13	15	16	12
	Koperasi Simpan Pinjam/Kredit	Unit	15	17	19	19	19	19	44
	Koperasi Unit Desa (KUD)	Unit	2	2	2	2	2	2	2
	Koperasi Pasar (KOPPAS)	Unit	8	8	8	8	8	8	4
	Koperasi Pedagang Kaki Lima	Unit	3	3	3	3	3	3	-
	Koperasi Karyawan (KOPKAR)	Unit	65	65	65	66	66	66	44
	Koperasi Pegawai Negeri (KPN)	Unit	91	91	91	91	91	91	77
	Koperasi Wanita (KOPWAN)	Unit	10	10	10	10	10	10	10
	Primkopad	Unit	13	14	14	14	14	14	16
	Primkopol /airud	Unit	4	4	4	4	4	4	5
	Primkopal	Unit	1	1	1	1	1	1	1
	Koppontren	Unit	19	19	19	19	19	19	19
	Koperasi Pensunian / wredatama	Unit	1	6	6	6	6	6	4
	Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai	Unit	7	7	7	7	7	7	1
	Koperasi Peternakan	Unit	2	2	2	2	2	2	2
	Koperasi Mahasiswa	Unit	5	5	5	5	5	5	1
	Kopti (Koperasi Tahu Tempe)	Unit	1	1	1	2	2	2	-
	Koperasi Kehutanan	Unit	1	1	1	1	1	1	-
	Koperasi Perikanan	Unit	1	1	1	1	1	1	-
	Koperasi Tani (Koptan)	Unit	1	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Wisata	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Kopermas	Unit	8	8	8	8	8	8	2
	Koperasi Lainnya	Unit	77	73	73	75	75	75	25
2	Jumlah koperasi	Unit	797	799	809	814	816	818	522
	- Pontianak Barat	Unit	134	134	141	141	139	139	82
	- Pontianak Selatan	Unit	228	228	180	182	226	226	139
	- Pontianak Utara	Unit	74	75	76	77	79	80	50
	- Pontianak Timur	Unit	53	53	57	58	57	58	34
	- Pontianak Kota	Unit	270	271	270	271	270	270	175
	- Pontianak Tenggara	Unit	38	38	85	85	45	45	42
3	Koperasi aktif	Unit	477	479	489	494	496	498	498
	- Pontianak Barat	Unit	78	78	83	83	82	82	80
	- Pontianak Selatan	Unit	134	134	108	110	133	133	132
	- Pontianak Utara	Unit	43	43	44	45	47	48	46
	- Pontianak Timur	Unit	27	27	31	32	31	32	33
	- Pontianak Kota	Unit	160	162	160	161	163	163	165
	- Pontianak Tenggara	Unit	35	35	63	63	40	40	42
4	Koperasi tidak aktif	Unit	320	320	320	320	320	320	24
	- Pontianak Barat	Unit	56	56	56	56	57	57	2
	- Pontianak Selatan	Unit	94	94	74	74	93	93	7
	- Pontianak Utara	Unit	31	32	32	32	32	32	4
	- Pontianak Timur	Unit	26	26	26	26	26	26	1
	- Pontianak Kota	Unit	110	109	110	110	107	107	10
	- Pontianak Tenggara	Unit	3	3	22	22	5	5	0
5	Jml Kop yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Unit	109	106	106	106	106	106	102
	- Pontianak Barat	Unit	20	10	10	10	10	10	12
	- Pontianak Selatan	Unit	37	29	29	29	29	29	26
	- Pontianak Utara	Unit	11	6	6	6	6	6	10
	- Pontianak Timur	Unit	7	2	2	2	2	2	5
	- Pontianak Kota	Unit	31	57	57	57	57	57	36
	- Pontianak Tenggara	Unit	3	2	2	2	2	2	13
6	Volume usaha koperasi	Rp. Milyard	98,498	198,353	98,497	98,497	98,497	98,497	255,781
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	10,096	10,095	6,694	6,694	6,694	6,694	15,240
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	38,079	38,079	10,886	10,886	10,886	10,886	62,299
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	11,467	11,467	14,465	14,465	14,465	14,465	10,795
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	648	648	1,292	1,292	1,292	1,292	4,003
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	35,235	135,091	49,456	49,456	49,456	49,456	138,222
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	2,973	2,973	15,704	15,704	15,704	15,704	25,222
7	SHU koperasi	Rp. Milyard	25,352	25,665	25,352	25,352	25,352	25,352	39,378
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	1,563	1,563	1,563	1,563	1,563	1,563	2,078
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	5,344	5,657	5,344	5,344	5,344	5,344	6,010
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	0,949

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,382
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	15,458	15,458	15,458	15,458	15,458	15,458	25,462
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	4,497
8	Permodalan koperasi	Rp. Milyard	653	726	653	405	405	405	388
	* Modal sendiri	Rp. Milyard	248,193	275,275	248,193	248,193	248,193	248,193	280,459
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	9,915	9,915	9,915	9,915	9,915	9,915	16,256
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	67,460	94,542	67,460	67,460	67,460	67,460	44,169
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	7,116
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	2,255
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	135,121	135,121	135,121	135,121	135,121	135,121	195,252
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	15,410
	* Modal luar	Rp. Milyard	157,030	175,324	157,030	157,030	157,030	157,030	107,513
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,687	12,911
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	22,911
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	3,265
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	3,288
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	120,299	138,593	120,299	120,299	120,299	120,299	61,535
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	13,355	13,355	13,355	13,355	13,355	13,355	3,604
9	Asset Koperasi	Rp. Milyard	405,301	405,301	405,301	405,301	405,301	405,301	683,131
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	22,602	22,602	22,602	22,602	22,602	22,602	46,485
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	18,786	18,786	18,786	18,786	18,786	18,786	135,388
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	93,203	93,203	93,203	93,203	93,203	93,203	22,125
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	9,929
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	233,703	233,703	233,703	233,703	233,703	233,703	420,471
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	48,733
10	Jumlah karyawan koperasi	orang	394	394	1,099	1,099	1,099	1,099	335
	- Pontianak Barat	Orang	19	19	20	20	20	20	49
	- Pontianak Selatan	Orang	92	92	43	43	43	43	63
	- Pontianak Utara	Orang	12	12	15	15	15	15	15
	- Pontianak Timur	Orang	8	8	32	32	32	32	15
	- Pontianak Kota	Orang	254	254	127	127	127	127	166
	- Pontianak Tenggara	Orang	9	9	862	862	862	862	27
11	Jumlah manajer koperasi	orang	30	30	9	9	9	9	21
	- Pontianak Barat	Orang	10	10	-	-	-	-	2
	- Pontianak Selatan	Orang	2	2	3	3	3	3	7
	- Pontianak Utara	Orang	1	1	1	1	1	1	2
	- Pontianak Timur	Orang	1	1	-	-	-	-	1
	- Pontianak Kota	Orang	15	15	3	3	3	3	8
	- Pontianak Tenggara	Orang	1	1	2	2	2	2	1
12	Jumlah pengurus koperasi	orang	1,489	1,503	1,503	1,445	1,448	1,448	1,551
	- Pontianak Barat	Orang	90	90	90	258	258	258	249
	- Pontianak Selatan	Orang	534	548	548	216	216	216	412
	- Pontianak Utara	Orang	137	137	137	143	146	146	142
	- Pontianak Timur	Orang	81	81	81	98	98	98	101
	- Pontianak Kota	Orang	537	537	537	520	520	520	513
	- Pontianak Tenggara	Orang	110	110	110	210	210	210	134
13	Jumlah pengawas koperasi	orang	1,310	1,316	1,346	1,364	1,367	1,367	1,488
	- Pontianak Barat	Orang	228	228	249	249	249	249	240
	- Pontianak Selatan	Orang	342	342	198	204	204	204	396
	- Pontianak Utara	Orang	123	126	129	135	138	138	138
	- Pontianak Timur	Orang	81	81	93	96	96	96	99
	- Pontianak Kota	Orang	485	488	485	488	488	488	489
	- Pontianak Tenggara	Orang	51	51	192	192	192	192	126
14	Jumlah anggota koperasi	orang	39.845	41.023	56.053	56.184	56.204	56.204	43.706
	- Pontianak Barat	Orang	4.797	4.797	11.944	11.944	11.944	11.944	6.745
	- Pontianak Selatan	Orang	15.156	16.263	7.004	7.044	7.044	7.044	13.488
	- Pontianak Utara	Orang	3.231	3.251	9.842	9.893	9.893	9.893	1.403
	- Pontianak Timur	Orang	1.337	1.368	1.518	1.538	1.538	1.538	1.749
	- Pontianak Kota	Orang	13.985	14.005	20.083	20.103	20.123	20.123	17.693
	- Pontianak Tenggara	Orang	1.339	1.339	5.662	5.662	5.662	5.662	2.628
15	Jumlah penduduk kota pontianak	orang	586.243	598.997	598.997	618.388	618.388	664.394	664.394
16	Prosentase jumlah anggota koperasi terhadap jumlah pen	%	6,80%	6,85%	9,36%	9,09%	9,09%	8,46%	6,58%
17	Prosentase koperasi yang aktif	%	59,70	59,95	60,44	94,27	95,94	95,94	95,40
18	Jumlah UMKM formal/informal	unit	5.119	6.175	6.196	7.812	8.011	8.584	8.584
	- Pontianak Barat	Unit	544	683	689	1096	1129	1255	1255
	- Pontianak Selatan	Unit	1292	1373	1378	1581	2752	2838	2838
	- Pontianak Utara	Unit	280	283	293	562	1614	1713	1713
	- Pontianak Timur	Unit	657	767	767	1068	809	907	907
	- Pontianak Kota	Unit	1700	2481	2481	2717	1102	1203	1203
	- Pontianak Tenggara	Unit	646	588	588	788	605	668	668
19	Jumlah Usaha Mikro	unit	4608	5497	5998	5106	5553	5779	5779

Tabel 2.11

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN											
	Prosentase peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB			26,08%	26,28%	26,28%	26,38%	26,08%	26,28%	26,28%	26,38%	
	Persentase bulan dengan harga stabil			95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
	Jumlah laporan evaluasi ketersediaan SEMBAKO			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terkendalnya harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah pelaku usaha ekspor,import yang dibina			132	137	142	117	115	115	115	99	
	Jumlah calon/pelaku usaha yang dibina			132	137	142	117	115	115	115	99	
	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
	Jumlah barang beredar yang diawasi			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang			2800	3000	3300	3956	2800	3000	3300	4472	
	Jumlah operasi pasar murah			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Persentase PKL yang diberdayakan			90	91	91	92	90	91	91	92	
	Jumlah PKL yang dibina			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Pasar rakyat yang berSNI			1	1	1	1	1	1	1	1	
	persentase pasar rakyat yang memenuhi sarana prasarana sesuai SNI			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah saluran pasar rakyat binaan dalam keadaan bersih			6	7	7	7	6	7	7	7	
	persentase tempat usaha yang diregistrasi			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah pasar rakyat yang aman dan bersih			6	7	7	7	6	7	7	7	
	persentase operasional UPT Pasar			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat binaan			7	8	9	10	7	8	9	10	
	persentase operasional UPT jasa usaha Pasar			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah rencana pembangunan pasar			1	1	1	1	1	1	1	1	
II	URUSAN PILIHAN : PERINDUSTRIAN											
	Persentase pertumbuhan industri kreatif			20	18,51	21,95	15,79	20	18,51	21,95	15,79	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase pelaku industri yang terlatih			20	20	20	20	20	20	20	20	
	Jumlah Industri yang difasilitasi HaKI dan Halal			1				1				Perubahan Indikator
	Jumlah Produk Pangan yang diuji			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah IKM/IRT yang dilatih			205	120	220	220	180	120	220	220	
	Persentase Produk pangan industri yang memenuhi standar keamanan			90	90	90	90	90	90	90	90	
	Jumlah IKM/IRT unggulan											
	Jumlah industri yang dimonitor dan dievaluasi			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Jaringan klaster				1				1			Perubahan Indikator
	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan			10				10				Perubahan Indikator
	Jumlah sarana dan prasarana industri untuk produk unggulan yang ditingkatkan			10				10				Perubahan Indikator
III	URUSAN WAJIB : KOPERASI DAN USAHA MIKRO											
	Persentase koperasi aktif			-	95,94	95,9	95,4	-	95,94	95,9	95,4	Perubahan Indikator
	Jumlah usaha mikro yang naik kelas			-	4	7	10	-	4	7	10	Perubahan Indikator
	Persentase Koperasi simpan pinjam/Usaha Simpan Pinjam yang bernilai Sehat			3	3	3	4	3	3	3	4	
	Jumlah Koperasi yang dimonev				150				150			Perubahan Indikator
	database koperasi dan usaha mikro					1				1		Perubahan Indikator
	Jumlah KSP/USP yang dinilai			15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Koperasi yang dimotivasi			150	100	120	150	150	100	120	150	
	Jumlah usaha mikro yang naik kelas			3	4	4	5	3	4	4	5	
	layanan konsultasi KUMKM			30				30				Perubahan Indikator
	Persentase pertumbuhan modal usaha mikro			50	69	70	70	50	69	70	70	
	Jumlah usaha mikro yang memiliki sarana prasarana standar			300	200	300	200	300	200	300	200	
	Jumlah KUMKM yang difasilitasi dan monev			1		1	1	1		1	1	Perubahan Indikator
	Persentase pelaku usaha mikro yang dilatih			90	95	95	95	90	95	95	95	
	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih			300	200	240	300	300	200	240	300	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

2.3.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, meliputi:

1. Tantangan terbesar saat ini adalah situasi Pandemi Corona Virus 19 (Covid-19) yang mengganggu aktivitas pelayanan dan perekonomian, dimana aktivitas seluruh program dan kegiatan menjadi terganggu.
2. Kegiatan Perlindungan Konsumen Kota Pontianak masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah masih rendahnya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.
3. Sehubungan dengan terbentuknya UPTD Metrologi legal Kota Pontianak, maka pelayanan tertib UTTP perlu peralatan, SDM yang kompeten, anggaran operasional yang memadai, sehingga investasi ke peralatan, peningkatan SDM, dan biaya akreditasi dalam jangka menengah diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi dan bersaing dengan laboratorium sejenis.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak, Tahun 2025 menuju Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa berwawasan Lingkungan, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/EAC) 2015, dan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement

(ACFTA) pada tahun 2010 merupakan tantangan bagi SKPD yang menangani sector Perdagangan, Industry dan Koperasi dan UKM untuk merevitalisasi industry berstruktur kuat, peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM dan penguatan serta pengamanan perdagangan.

5. Tingkat kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, manajemen pengelolaan pasar belum professional, merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan pasar tradisional menjadi pasar sehat dengan kondisi tetap aman, nyaman, tertib untuk bertransaksi bagi masyarakat kota Pontianak.
6. Kondisi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi sebanyak 106 unit dari jumlah koperasi aktif sebanyak 479 unit, UMKM mencapai 95% untuk skala usaha sulit berkembang, SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang rendah, kurang pemahaman pengurus, pengelola maupun anggota koperasi tentang perkoperasian, kepastian berusaha, akses pada sumber daya produktif rendah merupakan tantangan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Belum optimalnya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan UKM.
8. Belum optimalnya pengembangan koperasi berskala besar
9. Masih terbatasnya daya saing dan akses informasi KUMKM;
10. Masih rendahnya bantuan sosial (bansos) atau sejenisnya bagi KUMKM produktif yang berskala kecil;
11. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan, Pasar juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan antar Kawasan.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
2. Meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta jumlah penduduk yang sangat besar, berarti pasar lokal akan berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk menumbuhkan usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
3. Sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM merupakan lokomotif perekonomian nasional sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat.
4. Sektor perdagangan, hotel, restoran memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDRB Kota Pontianak ;
5. Letak dan Fungsi kota Pontianak diarahkan menjadi kota perdagangan dan jasa merupakan peluang yang cukup strategis, khususnya didalam lalu lintas perdagangan regional, nasional, maupun internasional untuk mengembangkan daerah pusat industri baru berbasis bahan baku lokal dan kuat strukturnya dan pusat perdagangan (distribusi) utama dengan penekanan pada revitalisasi industri terstruktur kuat dan penguatan serta pengamanan perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
6. Telah adanya peraturan perundang-undangan tentang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah;

7. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan akan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas usaha dan investasi bagi usaha IKM/IRT dan UMKM;
8. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman, sehingga pengelolaan pasar harus mendapat perhatian dan penanganan yang optimal; dan
9. Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah melaksanakan pelayanan umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Mengesahkan Pendirian/Perubahan badan hukum koperasi, pemberdayaan UMKM, pengelolaan pasar tradisional, memberikan Pengawasan dan Pengujian barang dan beredar sesuai SNI, pemantauan inflasi daerah, memberikan layanan Kemetrolagian Legal yang mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan Tera dan Tera Ulang peralatan UTTP.
10. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada rancangan awal RKPD Kota Pontianak dan kebutuhan program dan kegiatan RENJA Tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengemban Misi ke-4 (lima) : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing. Program-program yang mendukung pencapaian misi ini adalah sebagai berikut :

Urusan Koperasi dan UKM :

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan Umkm
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Perdagangan

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Perindustrian

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program rutin/wajib pendukung organisasi

Program-program prioritas sebagaimana diuraikan di atas merupakan program yang terkait langsung dengan upaya mencapai visi dan misi pembangunan lima tahun periode 2020 – 2024. Disamping itu, terdapat pula beberapa program yang perencanaan dibuat berdasarkan kebutuhan nyata yang bertujuan untuk mendukung pelayanan dan pencapaian Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Program-program rutin/wajib yang juga didasarkan atas kebutuhan riil adalah sebagai berikut :

Program dan kegiatan antara RKPD dan RENJA dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.12

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA PONTIANAK**

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Pontianak	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35,29%	2.439.777.335	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Pontianak	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35,29%	2.439.777.335	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
2	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	47%	2.105.711.153	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	47%	2.105.711.153	
3	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	2 pasar	648.249.128	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	2 pasar	648.249.128	
4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan	17 pasar	1.457.462.025	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan	17 pasar	1.457.462.025	
5	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Pontianak	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan	100%	334.066.181	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Pontianak	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan	100%	334.066.181	
6	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar	23 pasar	119.442.665	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar	23 pasar	119.442.665	
7	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan	23 pasar	214.623.516	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan	23 pasar	214.623.516	
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kota Pontianak	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	75.080.452	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kota Pontianak	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	75.080.452	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
9	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%	75.080.452	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%	75.080.452	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
10	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kota Pontianak	Jumlah barang beredar yang diawasi	12 item	75.080.452	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kota Pontianak	Jumlah barang beredar yang diawasi	12 item	75.080.452	
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Pontianak	1. Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92%	78.969.772	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Pontianak	1. Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	92%	78.969.772	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
		Kota Pontianak	2. Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	-		Kota Pontianak	2. Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	-	
12	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 bulan	6.905.583	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 bulan	6.905.583	
13	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Pontianak	Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan	6.905.583	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Pontianak	Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan	6.905.583	
14	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	< 5 %	72.064.189	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	< 5 %	72.064.189	
15	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pontianak	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 bulan	65.915.218	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pontianak	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 bulan	65.915.218	
16	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Operasi pasar	2 kali	6.148.971	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Operasi pasar	2 kali	6.148.971	
17	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kota Pontianak	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	24%	32.701.207	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kota Pontianak	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	24%	32.701.207	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
18	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 kali	32.701.207	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 kali	32.701.207	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
19	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Pelaku usaha yang dibina	10 usaha	32.701.207	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Pelaku usaha yang dibina	10 usaha	32.701.207	
20	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Pontianak	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97%	379.335.235	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Pontianak	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97%	379.335.235	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
21	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pontianak	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%	379.335.235	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pontianak	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%	379.335.235	
22	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal	12 bulan	379.335.235	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal	12 bulan	379.335.235	
23	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Pontianak	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100%	9.357.665	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Pontianak	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100%	9.357.665	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
24	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pontianak	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 bulan	9.357.665	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pontianak	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 bulan	9.357.665	
25	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	2 kali	9.357.665	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	2 kali	9.357.665	
26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Pontianak	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	409.085.091	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Pontianak	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	409.085.091	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
27	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	409.085.091	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	409.085.091	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
28	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pontianak	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	12 bulan	40.938.127	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pontianak	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	12 bulan	40.938.127	
29	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pontianak	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan	40 produk	232.625.570	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pontianak	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan	40 produk	232.625.570	
30	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Pontianak	Jumlah Industri yang diberdayakan	8 Industri	77.752.861	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Pontianak	Jumlah Industri yang diberdayakan	8 Industri	77.752.861	
31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Industri yang dilatih	25 industri	57.768.534	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Industri yang dilatih	25 industri	57.768.534	
32	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kota Pontianak	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	1. 2,5%	-	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kota Pontianak	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	1. 2,5%	-	
33		Kota Pontianak	2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2. 65%	3.203.590		Kota Pontianak	2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2. 65%	3.203.590	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
34		Kota Pontianak	03. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3. 100%	-		Kota Pontianak	03. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3. 100%	-	
35	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%	3.203.590	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%	3.203.590	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI)	12 bulan	3.203.590	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI)	12 bulan	3.203.590	
37	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Pontianak	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen	6.444.810	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Pontianak	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen	6.444.810	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
38	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	14%	6.444.810	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	14%	6.444.810	
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Pontianak	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12 bulan	6.444.810	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Pontianak	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12 bulan	6.444.810	
40	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Pontianak	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,96%	2.762.333	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Pontianak	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,96%	2.762.333	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
41	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	2.762.333	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	2.762.333	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
42	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan	12 bulan	2.762.333	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan	12 bulan	2.762.333	
43	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Pontianak	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19%	55.541.706	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Pontianak	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19%	55.541.706	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
44	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19%	55.541.706	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19%	55.541.706	
45	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	12 bulan	35.644.818	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	12 bulan	35.644.818	
46	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi	12 bulan	19.896.888	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi	12 bulan	19.896.888	
47	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Pontianak	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	16,67%	3.671.059	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Pontianak	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	16,67%	3.671.059	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
48	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	33%	3.671.059	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	33%	3.671.059	
49	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12 bulan	3.671.059	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12 bulan	3.671.059	
50	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Pontianak	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19%	390.304.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Pontianak	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19%	390.304.000	Program Pemulihan Ekonomi Nasional

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
51	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31%	390.304.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31%	390.304.000	
52	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pontianak	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	200 unit	390.304.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pontianak	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	200 unit	390.304.000	
53	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Pontianak	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10%	8.830.230	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Pontianak	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10%	8.830.230	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
54	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5%	8.830.230	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5%	8.830.230	
55	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	40 unit	8.830.230	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	40 unit	8.830.230	
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Pontianak	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5%	16.783.569	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Pontianak	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5%	16.783.569	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
57	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3%	16.783.569	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3%	16.783.569	
58	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pontianak	Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro	50 usaha	16.783.569	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pontianak	Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro	50 usaha	16.783.569	
59	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Pontianak	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3%	246.786.907	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Pontianak	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3%	246.786.907	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
60	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pontianak	persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3%	246.786.907	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pontianak	persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3%	246.786.907	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
61	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Pontianak	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	40 Usaha	246.786.907	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Pontianak	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	40 Usaha	246.786.907	
62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pontianak	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90%	9.896.369.038	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pontianak	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90%	9.896.369.038	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
63	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dok/lap	12.144.619	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dok/lap	12.144.619	
64	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen	6.865.551	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen	6.865.551	
65	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	50 sub kegiatan	1.337.081	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	50 sub kegiatan	1.337.081	
66	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	40 sub kegiatan	1.337.081	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	40 sub kegiatan	1.337.081	
67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 laporan	1.873.515	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 laporan	1.873.515	
68	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	731.391	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	731.391	
69	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	8.923.128.602	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	8.923.128.602	
70	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	8.443.700.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	8.443.700.000	
71	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	478.867.148	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	478.867.148	
72	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.454	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.454	
73	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN	39.892.252	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN	39.892.252	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
74	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	120 stel	39.892.252	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	120 stel	39.892.252	
75	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	208.349.825	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	208.349.825	
76	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.005.664	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.005.664	
77	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	85.892.095	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	85.892.095	
78	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan	6.505.259	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan	6.505.259	
79	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	11.929.645	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	11.929.645	
80	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	64.170.655	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	64.170.655	
81	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	11.769.515	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	11.769.515	
82	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	21.076.992	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	21.076.992	
83	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	96.582.102	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	96.582.102	
84	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	96.582.102	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	96.582.102	
85	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	454.540.836	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	454.540.836	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
86	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	366.896.624	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	366.896.624	
87	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	87.644.213	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	87.644.213	
88	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	30 unit	161.730.802	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	30 unit	161.730.802	
89	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 unit	27.334.099	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 unit	27.334.099	
90	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	6 Unit	4.317.090	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	6 Unit	4.317.090	
91	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	69.576.250	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	69.576.250	
92	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	60.503.363	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	60.503.363	
					14.055.004.000					14.055.004.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Pontianak melalui Bappeda telah mengembangkan Sistem berbasis internet yang lebih dikenal Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) untuk mengakomodir Usulan program dan kegiatan dari masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. Usulan program dan kegiatan disampaikan kepada RT selanjutnya ke kelurahan dan diinput langsung oleh operator yang ada di masing-masing SKPD melalui website Kementerian Dalam Negeri <https://sipd.kemendagri.go.id/>.

Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan akan dibahas dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing SKPD.

Usulan program dan kegiatan yang telah diakomodir dalam RENJA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Pontianak

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Pontianak	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3%	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pontianak	persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3%	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	RT. 004 RW. 018, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar (Lurah Sungaijawi Luar)	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	40 Usaha	diakomodir
		RW.011, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya (Lurah Parittokaya)			diakomodir
		Gg. Kurma Jaya RT. 006/RW. 001, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung (Lurah Sungaibeliung)			diakomodir
		Jln. Flora RT 003 RW 018, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)			diakomodir
		Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Sejahtera 3, RT. 002/RW. 015, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat (Lurah Bangka Belitung Darat)			diakomodir
		JL. TANJUNGPURA RT 02, 03, 04 / RW 03, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut (Lurah Benuamelayu Laut)			diakomodir
		RT. 02/ RW.07, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima (Lurah Pallima)			diakomodir
		RT 004 RW 009, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut (Lurah Bansir Laut)			diakomodir
		Sekelurahan BBL, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut (Lurah Bangka Belitung Laut)			diakomodir
		Gg. Lamtoro Jalur 3 RT. 05/RW.05, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung (Lurah Sungaibeliung)			diakomodir
		JALAN 28 OKTOBER PERUMAHAN MARISA 12 BLOK D NO 20, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu (Lurah Siantan Hulu)			diakomodir
		RW.011, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya (Lurah Parittokaya)			diakomodir
		Jln. Gusti Situt Mahmud Gang. Bersatu, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah (Lurah Siantan Tengah)			diakomodir
		Jln. Selat Panjang Gang. Kalawit dan Gang. Borneo, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu (Lurah Siantan Hulu)			diakomodir

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	Kota Pontianak	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Gg. Darma Bakti RT 004 RW 004, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)	Jumlah Industri yang diberdayakan	8 Industri	diakomodir
		Jl. SMU 5 RW 001, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)			diakomodir
		Jalan Padat Karya Komp. Star Borneo Residence 7 RT. 003 RW. 023, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon (Lurah Saigon)			diakomodir
		RW.001, Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah (Lurah Tengah)			diakomodir
		Gg. dodi RT. 004 / RW. 001, Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah (Lurah Tengah)			diakomodir
		Kelompok Tani Gg. Flora RT 004 RW 017, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)			tidak diakomodir : bukan kewenangan Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan kota pontianak, disarankan diusulkan di dinas pangan, pertanian, dan perikanan kota pontianak
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Pontianak	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35,29%	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	47%	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jln. Khatulistiwa, wilayah Tugu Khatulistiwa RW 001, RW 002, RW 003 dan wilayah Terminal Batulayang RW 020, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	2 Pasar	diakomodir
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Pontianak	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	Kota Pontianak	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Gg. Darma Bakti RT 004 RW 004, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)	Jumlah Industri yang diberdayakan	8 Industri	diakomodir
		Jl. SMU 5 RW 001, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)			diakomodir
		Jalan Padat Karya Komp. Star Borneo Residence 7 RT. 003 RW. 023, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon (Lurah Saigon)			diakomodir
		RW.001, Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah (Lurah Tengah)			diakomodir
		Gg. dodi RT. 004 / RW. 001, Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah (Lurah Tengah)			diakomodir
		Kelompok Tani Gg. Flora RT 004 RW 017, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)			tidak diakomodir : bukan kewenangan Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan kota pontianak, disarankan diusulkan di dinas pangan, pertanian, dan perikanan kota pontianak
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Pontianak	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	35,29%	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pontianak	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	47%	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jln. Khatulistiwa, wilayah Tugu Khatulistiwa RW 001, RW 002, RW 003 dan wilayah Terminal Batulayang RW 020, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang (Lurah Batulayang)	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	2 Pasar	diakomodir
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Pontianak	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19%	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	Kota Pontianak	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31%	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	wilayah Kelurahan Akcaya, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya (Lurah Akcaya)	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	200 Unit	diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Situasi Pandemi Corona Virus 19 (Covid-19) telah mengganggu aktivitas perekonomian nasional, dimana kegiatan usaha mengalami gangguan baik dalam proses produksi, distribusi dan kegiatan operasional lainnya yang akhirnya mengganggu kinerja perekonomian nasional. Dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak Covid-19 ini.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang bertema "Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural" terdapat 7 Prioritas Nasional. Dan salah satunya adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi.

Adapun Prinsip Program PEN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 adalah:

- a. Asas keadilan social;
- b. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- c. Mendukung Pelaku Usaha
- d. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan

akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
- f. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan Sektor Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

2. Meningkatkan Sektor Industri

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

3. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator persentase koperasi yang berkualitas dan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi

sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah :

1. **Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar.

2. **Meningkatnya Volume usaha Ekpor**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Volume Ekspor (ton).

3. **Terkendalinya Laju Inflasi.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan.

4. **Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti.

5. **Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

6. **Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri.

7. **Meningkatnya kelayakan perijinan industri**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan.

8. **Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase pertumbuhan industri.

9. **Meningkatnya Koperasi yang Aktif**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Koperasi yang berkualitas, Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dan persentase koperasi aktif.

10. **Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2022 meliputi:

1. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

Indikator kinerja: Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang ditingkatkan.

Kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran (Output): Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Indikator Keluaran (Output): Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Indikator kinerja: Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

Kegiatan:

a. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

Indikator kinerja: Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kegiatan:

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

- b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase koefisien variasi harga antar waktu.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Indikator kinerja: Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina
Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indikator kinerja: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Keluaran (Output): Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.

Kelompok sasaran: alat UTTP

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Indikator kinerja: Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Indikator kinerja : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.

Kegiatan:

a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*) : Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.

Indikator kinerja : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Indikator kinerja: Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Kegiatan:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

10. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Indikator kinerja: Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam
Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Indikator kinerja: Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.

Kegiatan:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

12. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Indikator kinerja: Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT

Kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

13. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Indikator kinerja: Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

14. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

Indikator kinerja: Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

15. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Indikator Keluaran (*Output*): Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

16. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya

Kegiatan:

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Indikator Keluaran (*Output*): persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

17. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

Indikator kinerja: Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (*Output*) : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah

Kelompok sasaran : OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran: Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran: Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran: Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan per bidang terakomodir dalam RENJA tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Sekretariat	1 Program	7 Kegiatan	23 Sub Kegiatan	9.896.369.038
Perindustrian	3 Program	3 Kegiatan	6 Sub Kegiatan	418.733.492
Perdagangan	5 Program	6 Kegiatan	7 Sub Kegiatan	575.444.332
Pasar	1 Program	2 Kegiatan	4 Sub Kegiatan	2.439.777.335
Koperasi Dan Usaha Mikro	7 Program	7 Kegiatan	8 Sub Kegiatan	724.679.804
Jumlah	17 Program	25 Kegiatan	48 Sub Kegiatan	14.055.004.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung program dan kegiatan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel 4.1.

4.2 PENDANAAN

Pendanaan untuk mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2022 berasal dari APBD Kota Pontianak dan Dana Alokasi Khusus untuk bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dana Alokasi Khusus berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM).

Perincian pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1. Perincian dana ini belum termasuk pendanaan hibah untuk Dekranasda Kota Pontianak yang rencananya sebesar Rp. 1,1 Milyard dan Penataan Pasar dalam rangka mendukung pencapaian adipura sebesar Rp. 2 Milyard.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								11,997,607,000			12,833,590,870		
2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,172,931,000			11,977,202,900		
2	17	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,143,000			13,567,500		
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	5 Dokumen	6,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	6,200,000
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	50 Sub Kegiatan	1,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	1,550,000
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	40 Sub Kegiatan	1,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	1,550,000
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	2 Laporan	1,873,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	3,262,500
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	2 Laporan	731	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	1,005,000
2	17	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,199,678,000				10,756,055,000	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan	8,720,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	10,263,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		478,867,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	492,050,000
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	1 Laporan		561	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	1,005,000
2	17	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									39,892,000			79,720,000		
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	120 Setel		39,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	79,720,000
2	17	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									208,366,000			392,372,000		
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		7,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	8,238,000
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		85,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	137,900,000
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		6,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	6,500,000
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		11,929,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	18,280,000
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		64,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	72,300,000
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		11,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	12,965,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		21,076,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	136,189,000
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								96,582,000				79,860,000	
2	17	1	2.07	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	10 Unit		96,582,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	79,860,000
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								454,540,000				463,538,400	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		366,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	376,600,000
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		87,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	86,938,400
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								161,730,000				192,090,000	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipeliharanyediaan jasa kebersihan kantor		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	1 Unit		27,334,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	34,140,000
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	6 Unit		4,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	39,535,000
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	12 Bulan		69,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	65,733,000
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	2 Unit		60,503,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	85%	52,682,000
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								2,762,000				6,000,000	
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								2,762,000				6,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.96%	12 Bulan		2,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	1.15%	6,000,000
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							55,540,000				73,054,250		
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							55,540,000				73,054,250		
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19%	12 Bulan		35,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	29%	37,975,250
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19%	12 Bulan		19,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	29%	35,079,000
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							3,671,000				10,895,000		
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							3,671,000				10,895,000		
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17%	12 Bulan		3,671,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	22%	10,895,000
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							390,304,000				394,448,720		
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							390,304,000				394,448,720		
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19%	200 Unit		390,304,000	DAK Non Fisik - PK2UKM		Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	23%	394,448,720
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							8,830,000				26,000,000		
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							8,830,000				26,000,000		
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	40 Unit		8,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	14%	26,000,000
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							16,783,000				60,615,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	17	7	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							16,783,000				60,615,000			
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	50 Usaha		16,783,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	9%	60,615,000
2	17	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							1,346,786,000					285,375,000		
2	17	8	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							1,346,786,000					285,375,000		
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3%	40 Usaha		1,346,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	5%	285,375,000
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							5,015,217,000					3,013,519,900		
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							75,080,000					86,940,950		
3	30	2	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							75,080,000					86,940,950		
3	30	2	2.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Jumlah barang beredar yang diawasi		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Item		75,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100%	86,940,950
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							4,439,776,000					2,321,191,000		
3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							4,105,711,000					2,125,197,000		
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yg tingkatkan	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.29%	2 Pasar		2,648,249,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yg tingkatkan	44.12%	515,997,000
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yg tingkatkan	Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.29%	17 Pasar		1,457,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yg tingkatkan	44.12%	1,609,200,000
3	30	3	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							334,065,000					195,994,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yg tingkatkan	Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.29%	23 Pasar		119,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yg tingkatkan	44.12%	29,925,000
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yg tingkatkan	Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.29%	23 Pasar		214,623,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yg tingkatkan	44.12%	166,069,000
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							78,968,000				126,629,200		
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							6,905,000				12,800,000		
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; Persentase kinerja realisasi pupuk	Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	12 Bulan		6,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; Persentase kinerja realisasi pupuk	92%	12,800,000
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							72,063,000				113,829,200		
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; Persentase kinerja realisasi pupuk	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	12 Bulan		65,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; Persentase kinerja realisasi pupuk	92%	90,619,200
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah Operasi pasar		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	2 Kali		6,148,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; Persentase kinerja realisasi pupuk	92%	23,210,000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							32,701,000				60,958,750		
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							32,701,000				60,958,750		
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina	Jumlah Pelaku usaha yang dibina		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24%	10 Usaha		32,701,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina	27%	60,958,750
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							379,335,000				390,900,000		
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							379,335,000				390,900,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97%	12 Bulan		379,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98%	390,900,000
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								9,357,000				26,900,000	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								9,357,000				26,900,000	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Kali		9,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/ kegiatan sejenis.	100%	26,900,000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								418,730,000				568,712,100	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								409,083,000				544,910,050	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								409,083,000				544,910,050	
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		40,938,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	60,138,500
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Produk		232,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	289,331,550
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Industri yang diberdayakan		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 Industri		77,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	127,789,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Industri yang dilatih		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	25 Industri		57,768,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	67,651,000
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							3,203,000			4,283,000			
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							3,203,000			4,283,000			
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI)		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.50%	12 Bulan		3,203,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	2.60%	4,283,000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							6,444,000			19,519,050			
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							6,444,000			19,519,050			
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12 Bulan		6,444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 Dokumen	19,519,050
TOTAL												17,431,554,000			16,415,822,870			

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Rencana Kerja juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum di dalam program dan sasaran yang bersifat makro.

Akhirnya, semoga laporan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 ini bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan bagi pencitraan Manajemen Publik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.

WALIKOTA PONTIANAK

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak

Telp/Fax : (0561) 730416 Email : dkump@pontianakkota.go.id